

346.05
DEV
F 91

**FUNGSI DAN PERANAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP
KELANGSUNGAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA KAUM CANIAGO
SUPANJANG ARO DI NAGARI SOLOK
(PROPINSI SUMATERA BARAT)**



**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai gelar Pasca Sarjana S-2
Magister Kenotariatan**

**EVA DEVI, SH
B4B 000 221**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
JANUARI
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tesis :

**FUNGSI DAN PERANAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP
KELANGSUNGAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA KAUM CANIAGO
SUPANJANG ARO DI NAGARI SOLOK (PROPINSI SUMATRA BARAT)**

Disusun oleh :

Eva Devi

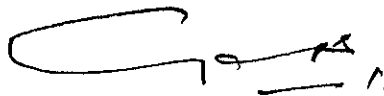
B4b 000 221

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 10 Januari 2003
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

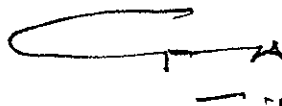
Komisi Pembimbing

Pembimbing



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Kenotariatan



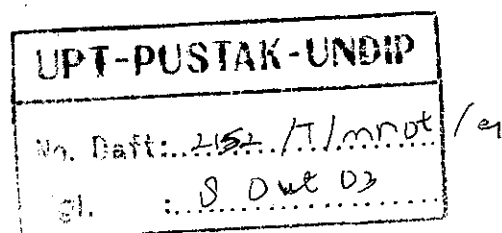
(Prof. IGN. Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat kata yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2002

Eva Devi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Devi

Alamat : Jl. Marahhadin No. 379 Kelurahan Kp. Jawa Solok
Telp. 0755 – 20455

Alamat Semarang : Jl. Anggrek VIII No 22 Semarang
Telp. 024-8453922

Tempat/Tgl Lahir : Solok 26 Juli 1973

A g a m a : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum menikah

Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri 05 Solok
(dari tahun 1980 –1986)
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(dari tahun 1986 –1989)
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(dari tahun 1989 – 1992)
- Universitas Andalas Fak. Hukum
(dari tahun 1993 – 1998)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kahadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya selama penulis menempuh studi hingga saat tersusunya tesis ini yang berjudul Fungsi dan Peranan Mamak Kepala Waris Terhadap Kelangsungan Harta Pusaka Tinggi Pada Kaum Caniago Supanjang Aro.

Adapun maksud pembuatan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat S2 di Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Didalam penyusunan tesis ini penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan dan pengalaman penulis yang sangat terbatas. Namun demikian penulis berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Dengan sepenuh hati penulis menyadari dan merasakan betapa besar bantuan dari beberapa pihak yang telah penulis terima didalam menyusun tesis ini oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH selaku Ketua program Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Diponegoro dan dosen pembimbing yang telah memberikan fasilitas dan pengarahannya didalam menyusun tesis ini.

2. Bapak R. Suharto, SH, Mhum, yang telah memeberikan beberapa saran dan masukan terhadap beberapa tesis ini
3. Bapak dan Ibu Dosen serta staf dan karyawan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro semarang
4. Para responden yang telah membantu jalannya peneitian:
 - a. Mamak Kepala Waris Caniago Supanjang Aro
 - b. Bapak Drs. Mansarkun, DT Rajo Nan Putiah (Ketua KAN)
 - c. Seluruh anggota Caniago Supanjang Aro
5. Ayah handa Haji Muhammad Syukur almarhum dan Ibunda Hajah Yuliar yang sangat penulis cintai yang te;ah dengan penuh kasih sayang memberikan dorongan pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kakak-kakaku tercinta (Nety Hartati, Susdarwani, Surliwati, Dra. Suryanti) serta keponakan-keponakanku tersayang (nocola, Zigo, Edo, Andre, Arie, Lenggo, Tomy, Meymey, Ade, Marcel, Aldo) yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Terimakasih yang paling dalam penulis ucapkan pada seseorang yang sangat panulis sayang dan cintai Afrinaldi, SH yang dengan setia mendampingi penulis dalam menyelesaikan tesis ini
8. Terima kasih kepada semua teman-teman yang baik dugi dan diana, maya y, fahri, yety, maya s, nirwana, rochim, sugeng, asep, rio, fendri, reza, wahyu, citra, lian, dan masih banyak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

**FUNGSI DAN PERANANA MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP
KELANGSUNGAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA KAUM CANIAGO
SUPANJANG ARO DINAGARI SOLOK
(PROPINSI SUMATERA BARAT)**

Mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dari saudara Ibu didalam suatu kaum, dia bertanggung jawab terhadap keutuhan kaum juga bertanggung jawab dalam mengawasi dan menjaga harta pusaka kaum baik kedalam atau keluar kaum. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat mamak kepala waris harus berusaha memlihara harta pusaka tinggi kaum jangan sampai terjual atau berpindah tangan kepada orang lain.

Fungsi dan peranan mamak kepala waris pada kaum Caniago Supanjang Aro terhadap harta pusaka tinggi kaumnya sangat penting dan berperan sekali dulunya, tetapi pada kenyataan ini telah terjadi pergeseran peranan mamak kepala waris terhadap pengawasan harta pusaka kaum. Berdasarkan masalah inilah penulis sangat merasa tertarik untuk membahas seberapa jauh pergeseran itu terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkan pergeseran fungsi dan mamak kepalan waris pada kaum caniago supanjang aro dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis dan mengadakan wawancara langsung degan obyek yang diteliti maupun dengan mamak kepala waris selaku pengawas harta pusaka tinggi kaum.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi mamak kepala waris terhadap kelangsungan harta pusaka tinggi kaum Caniago Supanjang Aro, namun peranan terhadap pembinaan harta tetap tidak dapat diganti oleh unsur lain di dalam masyarakat. Di sisi lain peran Sumando menjadi lebih dominan akibat semakin besar tanggung jawab materil terhadap anak dan istri sehingga kewibawaan mamak mulai berkurang kecuali yang bersifat waris.

ABSTRACT

THE ROLE OF UNCLE AS THE HEAD HEIR FOR CONTINUITY OF HIGH HERITAGE IN CANIAGO CLAN IN SUPANJANG ARO SOLOK (WEST SUMATERA)

The oldest brother from the mother in Supanjang Aro Solok has the big responsibility in one clan. His responsibility is not only for the family (nephew and nieces) but also for the welfare and heirlooms he is also the head heir in heirlooms. The high heritage of the clan especially for the land heritage has the high position. The land heritage can't be pawned and sold, but there are three requirements if the land heritage will be pawned. Number one if there is an adult girl is not married yet, number two if there is something wrong Rumah Gadang (Traditional House) number three if there is a corpse in the house.

The role of uncle as the head heir for the Clan Caniago Supanjang Aro is very important especially for the high heritage but now everything is changed, maybe because of the effect of technology or era.

Based on the text above the writer is very interested in analyzing about this problem and also far the role of uncle in Aro Solok can be seen? The writer will try to analyze by having research with the law sociology method and also by direct interviewing with the object research such as the uncle as the head heir.

From the result of the research we can get the conclusion that the role of uncle as the head heir in Supanjang Aro Solok decreased. But the role of uncle as the guiding in heritage still cannot be changed by other elements in society. Besides that the role of Sumando (brother in law) more dominant because of the heavier material responsibility to his wife and family will make that role of uncle decreased expect the heirlooms.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian	8
II. TINJAUAN PENELITIAN.....	9
A. Pengertian Mamak Kepala Waris di Solok Secara Umum.....	9
B. Sejarah Negari dan Asal Usul Nagari Solok	13
C. Suku dan Perkembangannya	16
C.1. Aliran Laras Koto Piliang.....	18
C.2. Airan Laras Bodi Caniaogo	19
D. Struktur Kekeuargaan Menurut Adat Minangkabau	23

D.1. Bentuk dan Sifat	27
D.2. Organisasi Kekerabatan Matrilineal.....	28
D.3. Peranan Laki-Laki dan Perempuan dalam Kekerabatan Matrilineal.....	30
D.4. Perkembangan Sistem Matrilineal	36
E. Harta dan Jenis Harta yang Diwariskan	37
E.1. Dari Segi Wujud Benda	37
E.2. Dari Segi Bentuknya	37
E.3. Dari Segi Asalnya	38
E.4. Dari Segi Penggunaannya	40
E.5. Macam Harta yang Menyangkut kehidupan Suami Istri	41
E.6. Macam Harta dan Segi Tersangka Hak Orang Lain Didalamnya.....	42
E.6.1. Harta Pusaka	43
E.6.2. Harta Bawaan	44
E.6.3. Harta Tepatan.....	44
E.6.4. Harta Pencarian	46
E.6.4. Harta Bersama.....	47
F. Sistem Waris yang Berlaku.....	50
F.1. Sistem Unilateral.....	51
F.2. Sistem Kolektif.....	53
G. Fungsi Harta terhadap Pembinaan Kaum.....	55

III.	METODE PENELITIAN.....	59
A.	Metode Pendekatan	59
B.	Lokasi Penelitian.....	59
C.	Sumber Data.....	60
D.	Teknik Pengumpulan Data	61
	D.1. Studi Kepustakaan.....	61
	D.2. Observasi	61
	D.3. Kuesioner.....	62
	D.4. Wawancara	62
E.	Metode Analisa Data.....	62
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A.	Pengertian Mamak Kepala Waris.....	64
B.	Syarat Penangkatan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum Caniago Supanjang	65
C.	Fungsi dan Peranan Mamak Kepala Waris	67
D.	Faktor-faktor Terjadinya Pergeseran Fungsi dan Peranan Mamak Kepala Waris dalam Mengawasi Pusaka Tinggi Kaum.....	71
	D.1. Sistem Keakraban.....	72
	D.2. Pusaka.....	73
	D.3. Kekuasaan di Rumah Tangga.....	74
	D.3.1. Penguasaan Tanah	76

D.3.2. Menentukan Masa Depan Kemenakan.....	76
D.3.3. Sistem Pewarisan Harta Pencaharian	77
D.3.4. Bukti Tertulis Hak Atas Tanah.....	77
D.3.5. Pengaruh Budaya Rantau	79
D.3.6. Pengaruh Rumah Inti.....	79
E. Kendala yang Dihadapi Mamak Kepala	
Waris dalam Mengawasi Harta Pusaka Tinggi Kaum.....	80
F. Pendapat-pendapat Tokoh Adat tentang	
Fugsi dan Peranan Mamak Kepala Waris Dewasa ini	83
V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
Ringkasan	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Minangkabau dalam suatu nagari terdapat beberapa suku, dan suku terdiri pula dari beberapa kaum, seterusnya kaum terdiri pula dari beberapa paruiik, tiap-tiap kelompok masyarakat itu mempunyai pemuka atau pemimpin dan anggota yang mendukung persekutuan itu serta mempunyai harta pusaka¹⁾.

Begitu pula kaum yang merupakan bagian dari suatu suku disamping mempunyai pemimpin dan anggota juga mempunyai harta pusaka baik yang diwarisi maupun yang didapati oleh kaum itu atas kerja sama kaum tersebut

Harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. dalam adat Minangkabau disebutkan "*dari niniak turun kemamak dari mamak turun ke kamanakan*" dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjual belikan seperti yang terdapat dalam pepatah adat "*dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando*", artinya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan. Harta pusaka itu didapat dari hasil

1) Syofyan Thalib, *Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan* (Laporan Penelitian), Fakultas Hukum Unand, 1978. hal. 1.

"*mamancang dan malatih*" dari orang tua-tua terdahulu, karena itulah setiap kaum di Minangkabau mempunyai harta pusaka. Harta pusaka itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali para anak kemenakan.

Dalam pengawasan harta pusaka tinggi, fungsi dan peranan mamak kepala waris kaum sangat penting demi kelangsungan harta pusaka tinggi tersebut bagi kehidupan anak kemenakan di kemudian hari. Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum. Maka Mamak kepala waris inilah yang akan mengurus dan mengembangkan harta pusaka tinggi itu untuk kepentingan anak kemenakannya yang mana pada saat sekarang ini kian hari kian berkembang juga kaumnya, sedangkan tanah tempat mencari nafkah tidak bertambah atau tetap seperti itu.

Peranan seorang mamak dalam hal harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Sebab bila kaum mempunyai harta pusaka yang banyak orang dikampung akan tetap menghormatinya. Sebaliknya bila suatu kaum, tidak memiliki/mempunyai harta pusaka maka otomatis status sosialnya disuatu kampung akan berkurang. Harta pusaka itu dapat berupa, sawah, ladang, dan

tanah. Harta di Minangkabau pada prinsipnya akan tetap utuh dan tidak pernah kurang. Karena harta tersebut tidak dapat dijual kecuali ada alasan-alasan lain seperti :

1. Untuk biaya perkawinan anak gadis (*gadiah gadang indak balaki*)
2. Ongkos penguburan mayat. (*maik tabujua ditangah rumah*)
3. Memperbaiki rumah adat (*rumah gadang katirisan*).
4. Pembayar hutang kaum (*Pambangik Batang Tarandam*)²⁾.

Dimana dengan tanah itu anggota-anggota atau anak kamanakan didalam kaum itu dapat melanjutkan kehidupan dengan menggarap tanah atau ladang yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kesejahteraan hidup bagi anggota kaum tersebut. Dimana dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini harta pusaka itu telah banyak tergadai disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktor adalah karena dalam adat Minangkabau proses gadai menggadaikan diperbolehkan. Proses penggadaian di Minangkabau dilakukan dengan cara meminjam beberapa emas atau uang pada pihak kedua dan pihak pertama menyerahkan harta berupa sawah atau ladang dengan perjanjian apabila

²⁾ Charul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta Jakarta, 1997 hal 94

dikembalikan uang kepada pihak kedua barulah sawah atau ladang tersebut dapat dikuasai lagi oleh pihak pertama. Bila masih belum dikembalikan oleh pihak pertama maka pihak kedua masih menguasai harta tersebut. Untuk proses gadai menggadai ini maka haruslah ada ijin dari mamak kaum (mamak kepala waris) dan bila ini tidak mendapat ijin maka proses penggadaian tidak akan dilakukan.

Dengan adanya program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, tanah merupakan faktor yang sangat rumit sekali untuk menunjang pembangunan tersebut, di Minangkabau dewasa ini masalah harta pusaka telah banyak yang terjual hal ini terlihat di Nagari Solok sendiri yang mana harta pusaka tinggi sudah banyak yang diperjual belikan, hal ini disebabkan kurangnya peranan mamak dewasa ini, sehingga para anak kemenakan telah berani untuk memperjual belikannya. Masalah ini telah banyak terjadi didaerah pinggir jalan, karena bagi sipenguasa tanah akan tergiur dengan harga tanah yang semakin tinggi. Selain uraian diatas, peranan mamak terhadap harta pusaka masih dapat dilihat umpamanya bila terjadi perselisihan atau persengketaan, maka yang menyelesaikannya adalah mamak. Persengketaan itu bisa saja terjadi bila harta pusaka itu terkena proyek pembangunan jalan oleh pemerintah, maka pemerintah akan menyelesaikannya dengan mamak, dan mamak akan memusyawarahkannya dengan anggota kaum lainnya.

Dalam hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali hal ini disebabkan oleh sifatnya tanah itu yang mana tanah merupakan satu-satunya hak kebendaan yang bagaimanapun bersifat abadi dan tetap.

Disamping itu berdasarkan fakta-fakta tanah itu merupakan :

1. Tempat tinggal persekutuan
2. Memberikan penghidupan kepada persekutuan
3. Tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan
4. Tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.³⁾

Berdasarkan sifat dan Fakta-fakta tersebut diatas terdapat hubungan yang erat sekali antara manusia sebagai anggota masyarakat dengan tanah yang dimiliki, hubungan mana bersifat magis religius.

Dari uraian diatas terlihat fungsi dan peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi (tanah), adalah sebagai pengawas terhadap harta pusaka tinggi kaum, tetapi pada saat sekarang ini telah terjadi pergeseran

³⁾ Soerojo Wignyodipoera, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**. CV. Haji Masagung, Jakarta, hal. 197.

mengenai fungsi dan peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi tersebut. Pergeseran fungsi dan peranan mamak kepala waris kaum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, adalah bentuk perkawinan yang berubah dari bentuk perkawinan sumando bertandang menjadi bentuk perkawinan sumando menetap, sehingga yang dulunya mamak kepala waris bertanggung jawab penuh pada anak kemenakannya beralih bertanggung jawab kepada anak isterinya.

Begitu juga dalam hal ini akan terlihat seberapa jauh fungsi dan peranan Penghulu dan Kerapatan Adat Nagari dalam hal menyelesaikan persengketaan atas pusaka tinggi kaum yang diawasi oleh masing-masing mamak kepala waris kaum.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **"FUNGSI DAN PERANAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KELANGSUNGAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA KAUM CANIAGO SUPANJANG ARO DI NAGARI SOLOK (PROPINSI SUMATERA BARAT)"**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan peranan mamak kepala waris pada zaman modern sekarang ini.
2. Mengapa terjadi pergeseran fungsi dan peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaum Caniago Supanjang A ro.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan fakta-fakta disekitar fungsi dan peranan Mamak Kepala Waris terhadap harta pusaka tinggi kaum pada saat ini.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pergeseran fungsi dan peranan Mamak Kepala Waris terhadap harta pusaka tinggi kaum itu.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagai mana tersebut diatas maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum khususnya pada hukum adat
2. Dari segi pragmatik, dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) yang berkaitan dengan fungsi dan peranan Mamak Kepala Waris terhadap harta

pusaka tinggi di Minangkabau, serta menambah khasanah bacaan hukum adat Minangkabau.

E. Sistematika Penulisan

1. Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis. Bab I Pendahuluan, akan memuat didalamnya mengenai latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka akan membicarakan mengenai tinjauan umum tentang sejarah negari solok suku dan perkembangannya, struktur kekeluargaan adat minangkabau, harta dan jenis data yang diwariskan. Bab III Metode Penelitian akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisa data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi pengertian mamak kepala waris, syarat pengangkatan kepala waris, fungsi mamak kepala waris, peranan mamak kepala waris, faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya mamak kepala waris, pendapat tokoh adat tentang fungsi dan peranan mamak kepala waris dewasa ini. Bab V Penutup akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, ringkasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah nagari solok dan pengertian mamak kepala waris secara umum

Berbicara mengenai pengakuan terhadap tanah, maka kita tidak terlepas dari subyek dan obyek yang harus diakui dan ada pihak yang mengakuinya. Subyek yang harus diakui sudah tentu adalah pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban atas tanah ulayat, sedangkan obyeknya sendiri adalah tanah ulayat. Pihak yang akan mengakui dapat dilihat dari dua sisi yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam mengakui keberadaan subyek dan obyek tidak terlepas dari khasanah peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), sedangkan masyarakat mengakui subyek dan obyek hak juga tidak terlepas dari hukum yang hidup berkembang dan dipahami serta diakui oleh masyarakat itu sendiri, dimana hukum adat senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhan merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku¹⁾. Dilihat dari faktor geneologis penguasaan dan pemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua yaitu: pertama tanah berstatus pusaka tinggi, kedua tanah dengan status pusaka rendah. Tanah pusaka tinggi ini tidak boleh dipindah tangankan dari satu suku ke suku lain dan yang berhak mewarisi

1) Muhammad Bushar, **Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar**, Pradinya Paramita, Jakarta. 1985. Hak.42.

tidak pernah putus dan selalu dilakukan secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan, harta pusaka tinggi ini merupakan hak bersama seluruh anggota kaum, masing-masing anggota kaum tidak dapat memilikinya secara hak pribadi ²⁾ semua berhak atas harta itu.

Tanah pusaka ini diawasi oleh mamak kepala waris dan dipelihara oleh penghulu. Harta pusaka rendah adalah harta yang di pusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya seperti ninik atau mamak, harta itu didapatkan melalui usaha sendiri (cancang latiah dan taruko) ³⁾. Harta pencarian akan menjadi harta pusaka tinggi bila telah diwariskan sampai tiga generasi keatas. Sedangkan harta cancang latiah diantaranya didapatkan dari hasil usaha di rantau. Dari kedua pengelompokan harta pusaka diatas terlihat bahwa Mamak Kepala Waris dan Penghulu mempunyai wewenang dan menjaga keutuhan dari tanah ulayat tersebut.

Dilihat dari faktor geneologis teritorial, maka bentuk hak atas tanah yang timbul dari keterikatan masyarakat dengan tanah adalah sebagai berikut ⁴⁾

²⁾ Van Dijk. **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Sumur Bandung, 1960, hal. 115.

³⁾ Ibid , hal .45.

⁴⁾ Hermayulis, **Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruh Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat**, Disertasi, UI, Jakarta 1999, hal 165-170.

1. Manah (Ulayat) Nagari yaitu seluruh wilayah atau tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat dalam nagari. Wilayah itu meliputi rimbo (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil hasil hutan tersebut. Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi - hutan dakek bakundanoi* : (jauh dilihat juga - dekat di datangi), pemanfaatan atas tanah (hutan rimba) baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan menurut hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada (undang-undang pokok kehutanan UU No: 5/1967 LN 1967 - 8)⁵⁾ tanah yang pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari: tanah yang selalu dihuni atau diolah secara terus menerus oleh anggota suku.
2. Manah suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah pengawasan penghulu pucuk atau penghulu andiko secara bersama-sama. Baik tanah tersebut berasal dari penemuan tanah tak bertuan, cancang latiah baik dengan melakukan taruko atas tanah manah nagari, gadang manyimpang dimana tanah tersebut berada dibawah pengawasan dan pemeliharaan penghulu dalam suku yang bersangkutan.
3. Manah kaum yaitu seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu atau datuk

⁵⁾ Boedi Harsono, **Hukum Argari Indonesia**, Jilid 1 Djambatan Jakarta, 1997, Hal 277

dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari peristiwa gadang menyimpang dari suku asal. Tanah ini diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum, dibawah penguasaan dan pemeliharaan tungganai.

4. Manah paruik yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu paruik manah ini berasal dari pembagian tanah ulayat kaum.
5. Manah keluarga yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu bagian dari paruik yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebihi tiga generasi, atau berasal dari pencaharian, taruko dan sebagainya.

Penguasaan terhadap tanah ulayat diatas tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan disebutkan hak ulayat di dalam undang-undang agraria yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan terhadap hak ulayat oleh karena itu hak ulayat akan diperhatikan sepanjang hak tersebut memang masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah umpamanya dalam penggunaan tanah seperti di Minangkabau yang diberikan dengan cara *ganggam bauntuak* (pinjam pakai) dimana harta pusaka tinggi itu hanya boleh dipakai saja oleh segenap warga yang bersangkutan dan tidak boleh dimiliki oleh masing-masing, jadi seorang mamak kepala waris mempunyai kewajiban yang tinggi dalam mengawasi dan memelihara harta pusaka tinggi dan anak kemenakan pada kaumnya.

Mamak kepala waris dalam kaum adalah sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum, sebagai hakim penyelesaian pertikaian baik pribadi ataupun masalah harta dalam kaum serta sebagai pengolah harta pusaka tinggi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas terlihat fungsi fungsi dan peranan mamak kepala waris sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu kaum sangatlah penting, dimana mamak kepala waris diharuskan berlaku adil terhadap anggota kaum atas penggunaan tanah ulayat.⁶⁾

B. Sejarah Nagari Solok dan Asal Usul Penduduk Nagari Solok

Sebelum kita mengkaji terlalu jauh sejarah dan asal usul penduduk Nagari Solok, alangkah lebih baik dahulu kita mengetahui sejarah dari suku bangsa Minangkabau. Mengenai suku bangsa Minangkabau banyak defenisi yang kita ketahui karena langkanya sumber sejarah yang bersifat autentik yang akan menuntun kita untuk dapat mengetahui asal usul bangsa Minangkabau, sungguhpun demikian hal ini dapat diketahui melalui literatur tradisional yang disebut *tambo* dan dari pepatah petitiyah yang senantiasa terpelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi secara lisan⁷⁾.

Kebenaran dari isi tambo tidak seluruhnya terjamin mengingat bahwa penyampaiannya berlangsung secara lisan dari ninik turun ke mamak dan turun ke

⁶⁾ Chirul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, 1997, Jakarta, Hal 93.

kemenakan dan baru ditulis setelah nenek moyang orang Minangkabau mengenal tulisan arab yang berbahasa melayu. Sejarah nama Minangkabau berasal dari tanduk kerbau yang mana pada saat itu tanduk kerbau itulah yang bernama minang ⁸⁾.

Dan dari cerita turun temurun dapatlah diketahui bahwa pada umumnya berbagai nagari di Minangkabau berasal dari Pariangan Padang Panjang yang terletak di lereng Gunung Merapi, setelah kemudian mereka berkembang, maka berdirilah negeri-negeri di sekelilingnya atau di selingkaran Gunung Merapi dan selingkaran Batang Bengkaweh ⁹⁾.

Hal ini sesuai dengan pepatah adat dalam bentuk pantun ini :

Dimano mulonyo titiak palito (dari mana titik pelita),
Dibaliak telong nan batali (dari semak turun kepada),
Dimano mulonyo asa ninik kito (dari mana asal nenek moyang kita),
Diateh puncak Gunung Merapi (dari puncak Gunung Merapi).

Karena penduduk asli berasal dari Pariangan Padang Panjang menjadi berkembang dan padat juga, sesuai dengan perkembangan penduduknya yang menyebar kesekeliling lereng Gunung Merapi, mencari tanah yang subur yang akan dijadikan sawah dan ladang, maka beberapa laki-laki yang ditemani oleh keluarganya untuk mencari tempat tinggal yang baru untuk penghidupan anak kemenakan

⁷⁾ Amir Syarifuddin, **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan**

⁸⁾ Wawancara dengan Ketua KAN Solok, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2002

⁹⁾ Sidi Gazalba, **Konflik antara Adat, Agama dan Pengaruh Barat**, Seminar Islam di Minangkabau, Padang 1969, hal. 3.

dikemudian hari. Didalam tambo disebutkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya muncul tiga daerah disekeliling Gunung Merapi yang disebut *luhak*, yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota. Penamaan dari ketiga luhak tersebut adalah dengan mengambil dari tiga unsur besar yang terdapat di Gunung Merapi. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Daerah yang sumur yang satu ditumbuhi mensiang Agam, disebut Luhak Agam.
2. Daerah yang tanahnya luas dan datar disebut Luhak Tanah Datar.
3. Daerah yang digunakan untuk minum dan dihuni oleh 50 keluarga disebut Luhak 50 Kota ¹⁰⁾.

Demikian juga halnya penduduk Nagari Solok berasal dari Luhak Tanah Datar yang menurut sejarah terbentuknya Nagari Solok, awalnya merupakan perjalanan niniak (nenek moyang) dari Luhak Tanah Datar menuju Singkarak dan berkumpul di Taluak Tanjuang Paku. Seiring dengan perkembangannya daerah itu terbentuk 2 (dua) nagari kecil yang bernama Nagari Korong Gadang dan Nagari Aro. Kedua nagari ini akhirnya membentuk satu nagari yang lebih besar yang dinamakan Nagari Solok. Kata dari Solok berasal dari Kata Saelok, yang artinya “yang terbaik”, yang merupakan penjabaran hasil yang terbaik dari musyawarah antara Nagari Korong Gadang dan Nagari Aro untuk membentuk nagari yang lebih luas yang

¹⁰⁾ Dt. Maruhum Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli Jakarta, 1950, hal. 13.

akhirnya nama "*Saelok*" ini digunakan untuk menjadi nama nagari hasil musyawarah kedua nagari tersebut.

C. Suku dan Perkembangannya

Suku dan perkembangan Kaum Caniago Supanjang Aro tidak terlepas dari sejarah perkembangan suku Minangkabau. Dahulunya orang Minangkabau ini terbagi atas *payuang ketek*, *payuang manangah*, dan *payuang gadang*. Payuang ketek, dibawahhi oleh Penghulu Andiko yang disebut dengan Tuo Kampuang, dan dibantu oleh 3 (tiga) orang pembantu yaitu :

1. Manti, yang tugasnya untuk Pamong Praja,
2. Dubalang, yang tugasnya untuk Keamanan Nagari,
3. Malin, yang tuganya untuk agama ¹¹⁾

Anggota dari Payung Ketek adalah famili dari Rumah Gadang..

Setelah itu payuang manangah dikepalai seorang penghulu yang disebut *Pangka Tuo Kampuang*. Anggota payuang manangah adalah orang rumah gadang. Kemudian payuang gadang, dikepalai oleh seorang Penghulu yang disebut *Pangahulu Pucuak*, yang anggotanya dari kumpulan beberapa buah rumah gadang.

Atas anjuran Dt. Perpatiah Nan Sabatang kepada Suri Dirajo dimufakati bersama-sama dengan Dt. Ketumanggungan, diberilah nama suku bagi yang sekaum.

¹¹⁾ M. Rasyid Manggis Dt. Rajo Penghulu, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hal. 17.

Suku mula-mula yang ada di Minangkabau adalah suku Melayu. Dari sebuah suku ini, kemudian terbentuklah 4 (empat) buah suku yang lain, yaitu Suku Koto, Suku Piliang, Suku Bodi dan Suku Caniago.

Dengan demikian dalam sebuah nagari ada sekurang-kurangnya empat macam suku, hal ini adalah karena syarat untuk dapatnya terbentuk sebuah nagari sebagai wilayah dulunya terdapat empat macam suku¹²⁾.

Orang yang sama sukunya atau yang lazim disebut sepesukuan tidak boleh bercerai-berai, melainkan mestinya tetap sesusunan seperti sirih serumpun, seperti serai, sehina semulia, malu seorang malu semua.

Jadi pengertian suku, adalah tali darah orang sebuah paruik, sebab itu orang yang orang yang sepesukuan tidak boleh pulang memulangi, artinya dilarang kawin mengawini¹³⁾. Adat bersuku-suku amat besar faedahnya bagi masyarakat dalam pergaulan hidup berkeluarga, berkorong, berkampung, bernagari, berluhak dan sebagainya. Dengan adanya suku mudah menghitung, berapa macamkah kelompok anggota masyarakat itu dalam masyarakat, empat lima suku atau lebih.

Suku Koto dan Suku Piliang menganut ajaran Dt. Ketumanggungan sedangkan Suku Bodi dan Caniago menganut ajaran Dt. Perpatiah Nan Sabatang, sehingga pada nagari di Minangkabau menganut dua aliran hukum yang disebut

¹²⁾ Syofyan Thalib, *Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan (Laporan Penelitian)*, Fakultas Hukum, 1978. hal.15.

¹³⁾ M. Rasyid Manggis Dt. Rajo Penghulu, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Mutiara Jakarta, 1982, hal. 114.

aliran laras Koto Piliang dan aliran Bodi Caniago. Laras maksudnya adalah merupakan kesesuaian atau keserasian dua suku dalam menganut ajaran. Aliran hukum yang dianut pada masyarakat adat Minangkabau, yaitu :

1. Aliran Laras Koto Piliang

Aliran Laras Koto Piliang menganut ajaran Dt. Katumanggungan yang bersifat otoriter. Menurut adat ini nagari diperintahkan oleh penguasa tunggal yang disebut Penghulu Pucuak yang dibantu oleh Penghulu keempat suku dan berhubungan dengan rakyat melalui andikonya. Adat ini menganut prinsip berjenjang naik, bertangga turun dalam hirarkhi pemerintahannya. Artinya sembah datang dari anak buah melalui tangga dan titah turun dari pemimpin kepada rakyat melalui jenjang. Pangkat penghulu tidak sama, hingga balairung tempat rapat dibuat bertingkat pula ¹⁴⁾

Yang berhubungan dengan penyelesaian persengketaan antara anggota masyarakat. Penyelesaian persengketaan mula-mula oleh tungganai rumah gadang. Kalau tidak putus, maka penyelesaian dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Penghulu Suku. Bila tidak selesai juga, maka diselesaikan kerapatan adata nagari dan terakhir kata putus berada ditangan penghulu pucuak sebagai penguasa tertinggi dalam nagari. ¹⁵⁾

¹⁴⁾ Dr. Amir Syarifuddin, **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau**, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 154.

¹⁵⁾ *ibid*

2. *Aliran Laras Bodi Caniago*

Aliran Laras Bodi Caniago menganut ajaran Dt. Parpatiah Nan Sabatang bersifat demokratis. Menurut adat ini negeri diperintah bersama dalam suatu permusyawaratan.¹⁶⁾

Penguasaan negeri ini berhubungan langsung dengan rakyat tanpa melalui tangga atau jenjang. Adat ini menjalankan prinsip duduk sama rendah tegak sama tinggi. Pangkat penghulu sama derajatnya, dalam menyelesaikan sengketa antara sesama anggota dalam negeri setiap sengketa diselesaikan melalui kerapatan seluruh penghulu suku sebagai mahkamah pertama dan tertinggi, jadi putusan tidak dapat dibanding lagi.

Penghulu-penghulu di setiap nagari adalah merupakan saluran dari pemerintah untuk membina partisipasi masyarakat pada umumnya, anak kemenakan pada khususnya untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada Nagari Solok, Penghulu pada suku-sukunya tidak memakai sebutan Penghulu Pucuk seperti pada nagari lainnya di Minangkabau. Tiap-tiap suku mempunyai penghulu pada sukunya masing-masing. Ajaran yang dipakai di nagari Solok adalah kedua aliran ajaran tersebut baik aliran Laras Koto Piliang maupun aliran Laras Bodi Caniago.

¹⁶⁾ Bushar Muhammad, **Pokok-pokok Hukum Adat**, Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 82.

Hal ini terlihat dari asal usul pembentukan Nagari Solok yang merupakan hasil mufakat dan musyawarah yang demokrasi dari tiap-tiap penghulu suku yang ada pada saat itu, sehingga melahirkan nama Solok yang berasal dari kata "saelok" (yang terbaik), sehingga kedudukan penghulu di Nagari Solok sama derajatnya pada tiap-tiap suku dan menyebabkan di Nagari Solok tidak mempunyai "Baliurang" (Balai Adat) melainkan hanya sebuah tempat musyawarah sesuai dengan prinsip "*duduak samo randah, tagak samo tinggi*" (Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi). Sedangkan ajaran laras Koto Piliang pada Nagari Solok hanya terlihat pada pengangkatan penghulu dikaumnya yang dilakukan secara turun temurun yang didapat dari mamak (kakak laki-laki dari pihak Ibu yang paling tua atau yang dituakan).

Di Nagari Solok terdapat 9 (sembilan) suku induk, yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang pemimpin yang disebut Penghulu. 9 (sembilan) suku tersebut adalah :

1. Suku Caniago Supanjang Aro, penghulunya Dt. Bandaro Hitam,
2. Suku Caniago Tabu, penghulunya Dt. Rajo Nan Sati,
3. Suku Caniago Koto Darek, penghulunya Dt. Sati,
4. Suku Caniago Ampek Korong, penghulunya Dt. Tankali,
5. Suku Caniago Baruah, penghulunya Dt. Bandaro Panjang,
6. Suku Caniago Korong Gadang, penghulunya Dt. Bandaro Kayo,
7. Suku Caniago Sei Napa, penghulunya Dt. Rajo Kaciak Basa,

8. Suku Piliang, penghulunya Dt. Panduko Basa,

9. Suku Melayu, penghulunya Dt. Rj. Intan. Rj. Nan Sati

Sumber data. (*Dasrul Datuk Yang Dipertuan, Pemuka Adat Nagari Solok hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2002*).

Dari 9 (Sembilan) suku yang ada di Nagari Solok terus berkembang dan membuka daerah baru untuk menetap. Pada daerah tersebut juga didiami pendatang sehingga untuk mengurus daerah baru ini, mereka mengangkat penghulu pada tiap daerahnya masing-masing.

Daerah baru tersebut adalah :

1. *Anam Suku, penghulunya Datuak Gamuak.*

Suku-suku yang ada pada daerah ini, terdiri dari enam suku yaitu, suku Caniago, suku Kutianya, suku Malensiang, suku Singkuang, suku Koto, suku Napa Iiie,

2. *Nan Balimo, penghulunya Datuak Ganjia.*

Suku-suku yang ada pada daerah ini, terdiri dari lima suku, yaitu, suku Caniago, suku Kutianya, suku Balai Mansiang, suku Koto, dan suku Supadang.

3. *Nan Barampek, penghulunya Datuak Rajo Dilangik*

Suku-suku yang ada pada daerah ini ini, terdiri dari dari empat suku, yaitu suku Caniago, suku Melayu, suku Supadang dan suku Balai Mansiang.

Setelah terbentuknya penghulu pada daerah-daerah ini, maka pada Nagari Solok terkenal dengan sebutan "*Datuak Nan Sambilan, Pengahulu Nan Duo Baleh*". Datuak Nan Sambilan, tiap-tiap sukunya mempunyai seorang penghulu, dan adat pada tiap-tiap sukunya sama dan harta pusakanyapun sama, sedangkan pada anam suku, nan balimo dan nan barampek, penghulunya mengepalai dari suku-suku yang ada dan tiap daerahnya mempunyai adat yang sama tapi harta pusakanya tidak. Melainkan harta pusakanya sesuai dengan sukunya masing-masing.

Jadi pengertian penghulu dalam adat adalah Pemimpin atau Kepala yang bertanggung jawab kepada masyarakat atau anak kemenakannya yang dipimpinnya didalam sebuah suku¹⁷⁾.

Penghulu-penghulu adat dalam kehidupan masyarakat nagari adalah berperan sebagai informasi bagi anggota kaumnya, walaupun mereka tidak mempunyai jabatan sesuai dengan struktur pemerintah, tetapi mereka mempunyai pengaruh yang besar, bahkan menentukan dalam kehidupan suku/kaumnya serta dalam masyarakat nagari. Dalam setiap kegiatan terutama yang bersifat suku, mereka adalah orang yang didahulukan selangkah.

Disebabkan karena penghulu itu adalah kepada atau pemimpin utama dari anggota suku atau kaum, maka dengan sendirinya penghulu atau kepala suku itu

¹⁷⁾ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, **Pegangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau**, Remaja Karya, Bandung, 1986, hal. 1.

haruslah betul-betul mempunyai budi pekerti yang baik, karena ia akan menjadi contoh dan panutan dari anak buahnya.

Dari pengertian diatas maka fungsi dari penghulu dalam adat Minangkabau adalah *pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, menyalasakan nan kusuik, menjaniahkan nan karuah* ¹⁸⁾ (pergi tempat bertanya, pulang tempat memberi khabar, menyelesaikan masalah yang kusut, menjernihkan yang keruh).

D. Struktur Kekeluargaan menurut Adat Minangkabau

Kaum Caniago Supanjang Aro adalah suatu kelompok masyarakat Persekutuan Hukum yang menurut garis keibuan sebagaimana menurut adat Minangkabau (matrilinial), maksudnya anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan akan mengikuti garis keturunan ibunya. Yang berkuasa ditengah keluarga bukanlah laki-laki, tapi seorang perempuan yaitu nenek (matriachat). Anak laki-laki dan saudara laki-laki bekerja mencari nafkah untuk kepentingan ibu atau saudara perempuannya dan kemenakannya. Karena itu menurut Kaum Caniago Supanjang Aro seorang laki-laki tidak mempunyai kewajiban untuk membelanjai anak dan isterinya. Tugas untuk membelanjai anak dan istrinya adalah terletak ditangan saudara laki-laki dari isterinya atau mamak dari anak-anaknya. Sampai sekarang adat

¹⁸⁾ M. Rasyid Manggis Dt. Rajo Penghulu, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hal. 127.

itu masih dilaksanakan terutama di desa-desa yang masih melaksanakan hukum adat yang baik.

Adalah malu keluarga kalau seandainya saudara perempuan minta uang belanja pada suaminya, disebabkan dikatakan tadi tugas memberi nafkah bukan ditangan suami tapi terletak ditangan saudara laki-laki dan mamaknya. Tugas suami dalam keluarga isterinya hanyalah memberikan keturunan yang baik bagi keluarga isterinya sebagai masyarakat yang matrilineal.

Mamak itu tugasnya menjaga dan memelihara hubungan keluar. Sedangkan di dalam rumah tangga sendiri perempuanlah yang berkuasa. Dalam hal harta pusaka tugas mamaklah mengurus dan mengatur penggunaannya. Dia tidak berhak membawa hasil harta tua ke rumah isterinya. Dan semenda-semenda yaitu suami-suami dari perempuan-perempuan di dalam rumah itu sama sekali tidak boleh campur tangan di dalam rumah isteri dan anaknya. Kadang-kadang bila anak kandungnya sendiri akan dikawinkan oleh mamaknya, si semenda hanya diberitahu saja dan tidak berhak membantah.

Dengan demikian seoran suami terhadap isterinya dan ayah terhadap anak tidaklah ada tanggung jawabnya.

Menurut Hamka, bahwa pada kenyataannya sekarang ini pada suatu keluarga, suamilah yang bertanggung jawab terhadap anak isterinya. Si isteri tidak lagi meminta belanja kepada mamaknya, karena kalau dilakukan hal itu, keluarga itu

akan merasa malu dengan masyarakat sekelilingnya, karena masyarakat beranggapan suami dirumah tidak bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya.

Hal itu juga dapat kita lihat dalam hal perkawinan masyarakat sekarang ini, yang mana untuk mencari jodoh bagi anak perempuan, peranan mamak tidak dominan lagi, karena pada kenyataannya, anak-anak perempuan sudah dapat menentukan jodoh sendiri dan mamak hanya diberitahu kemudian, malahan kadang-kadang si bapak sendiri yang mencari jodoh untuk anak perempuannya. Dan pada waktu melaksanakan perkawinan saja mamak dibutuhkan, umpamanya dalam hal peminangan dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa hukum adat Minangkabau sudah berubah, kalau dulu tanggung jawab ditangan mamak dan saudara laki-laki, tapi sekarang sudah beralih ketangan suami.

Bila diperhatikan dari sejarah Adat Minangkabau, setiap rumah gadang dikepalai oleh seorang Tungganai atau mamak rumah, yaitu saudara kandung / saudara laki-laki garis ibu. Dalam dewan menteri yang dikenal dengan Basa Ampak Balai, semuanya laki-laki. Demikian pula semua pimpinan nagari yang disebut orang empat jenis juga laki-laki. Dapat dikatakan bahwa untuk kekuasaan diluar rumah tangga baik yang menyangkut bidang politik atau mewakili keluarganya dalam forum umum adalah laki-laki. Tetapi didalam masyarakat Minangkabau disebut Matrilineal, karena menarik garis keturunan dari garis ibu, anak perempuan sebagai yang berhak mewarisi.

Memang ada beberapa bentuk kekuasaan terpegang ditangan perempuan seperti yang telah diuraikan diatas tadi yaitu antara lain kekuasaan itu mempunyai hubungan yang rapat dengan peranannya dalam kelangsungan keturunannya.

Ada yang meragukan penggunaan kata matrilineal untuk bentuk kekerabatan Minangkabau dengan beberapa alasan ¹⁹⁾.

1. Tidak munculnya tokoh perempuan dalam asal-usul kejadian nenek moyang Minangkabau, yang muncul dan disebut sepanjang sejarah adalah laki-laki.
2. Adanya kecenderungan untuk mencari laki-laki yang baik untuk urang sumando guna mendapatkan keturunan yang baik.
3. Penurunan pangkat kepada anak dalam kepeimimpinan.

Bila diperhatikan alasan-alasan yang disebutkan diatas terutama bagian pertama, memang betul bahwa dalam sejarah Minangkabau yang terlihat dalam tambo tokoh yang selalu muncul laki-laki. Tetapi perlu juga diketahui bahwa sejarah Minangkabau yang terlihat dalam tambo dan kaba lebih banyak memperlihatkan kekuasaan dan tokoh dalam bidang politik, hingga tidak dijelaskan adanya kekuasaan dan peranan perempuan sebagai tokoh penyambung garis keturunan. Munculnya selalu tokoh laki-laki dalam literatur tradisional Minangkabau tidaklah berarti bahwa adat Minangkabau menganut sistim patrilineal (kebapaan).

¹⁹⁾ Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 183

Selanjutnya bila diperhatikan ciri-ciri masyarakat yang menganut sistim matrilineal, yaitu :²⁰⁾

- Keturunan dihitung dari garis ibu.
- Anak dari dua orang bersaudara perempuan adalah sangat hina kalau mengadakan perkawinan.
- Dalam penentuan keturunan pihak suami tidak masuk hitungan.
- dan anak-anak dibesarkan di rumah ibunya.

Kemudian dilihat pula adat yang berlaku di Minangkabau yang mengenal hal-hal tersebut diatas, ternyata ciri-ciri tersebut menurut asalnya terdapat juga di Minangkabau. Dengan demikian tidak dapat disangkal berlakunya bentuk struktur kekeluargaan yang matrilineal di Minangkabau tersebut dapat kita lihat pada :

1. Bentuk dan sifat.

Hubungan kekerabatan matrilineal adalah bersifat alamiah dan lebih awal munculnya dalam peradapan manusia dibandingkan bentuk kekerabatan lainnya. Hubungan kekerabatan matrilineal ini telah ada semenjak manusia mulai mengadakan hubungan dengan manusia lingkungannya. Pada waktu itu manusia mulai menyadari adanya hubungan ibu dan anak sebagai kelompok inti masyarakat. Dalam kelompok inti itu anak hanya mengenal ibunya dan tidak mengenal ayahnya. Ayah hanya sebagai orang yang singgah dalam kehidupan ibunya yang menyebabkan ibunya yang

20) St. Takdir Alisyahbana, *Sistem Monarchi Minangkabau dan Kedudukan Perempuan*, Internasional Seminar on Minangkabau, Bukittinggi 1980, hal. 8.

melahirkan anak-anaknya. Itulah yang mengasuh, mengurus dan membesarkannya, hingga menjadi kepala keluarga.

Bila diperhatikan bahwa Minangkabau sampai saat ini masih menganut sistim matrilineal, dan diperhatikan pula, bahwa pengaruh yang datang ke Minangkabau tidak ada yang menganut paham yang matrilineal, maka dapat disimpulkan bahwa sistim matrilineal adalah bentuk asli di Minangkabau. Dan dapat dikatakan di wilayah Republik Indonesia hanya Minangkabaulah yang menganut sistim matrilineal yang dapat bertahan sampai sekarang.

2. *Organisasi kekerabatan matrilineal.*

Sebagaimana disebutkan diatas, kesatuan atas dasar keturunan di Minangkabau disebut suku. Orang yang berada dalam satu kesatuan itu meyakini bahwa mereka berasal dari ibu yang sama yaitu mula-mula datang ketempat itu untuk membangun kehidupan. Kemudian ibu asal beranak dan bercucu. Rumah yang mula-mula dibangun itu tidak dapat lagi menampung seluruh keluarga. Kemudian sicucu yang tidak mempunyai tempat lagi dirumah asal, mendirikan rumah baru disekitar rumah asal itu. Sicucu berkembang dan membutuhkan rumah pula. Dengan demikian terdapatlah rumah-rumah yang disekelilingi rumah asal, yang mana anggotanya bila ditelusuri keatas secara garis keturunan ternyata mereka berasal dari ibu yang mula-mula mendiami rumah asal.

Oleh karena itu semua keluarga yang tinggal dilingkungan itu merasa bersaudara dan terikat dalam satu kesatuan yang disebut suku.

Dengan demikian kesatuan suku mengandung arti keturunan atau geneologis. Karena kesatuan suku berasal dari satu ibu yang mendiami rumah asal, kesatuan suku itupun dapat pula disebut paruik dalam pengertian yang luas, terutama bila kesatuan ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Bila kesatuan paruik dikatakan kesatuan hukum maka yang dimaksud dengan paruik disini adalah kesatuan paruik dalam arti luas

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan organisasi dalam kekerabatan matrilineal sebagai berikut²¹⁾

1. Serumah sebagai kesatuan yang paling rendah.
2. Jurai sebagai kesatuan yang berada diatas rumah yang kesatuan itu sudah berkembang.
3. Paruik sebagai kesatuan geneologis yang teratas yang antara sesama anggota sudah sulit untuk mengetahui karena begitu luasnya.

Setiap kesatuan tersebut diatas dikepalai oleh seorang laki-laki tertua dalam kesatuan itu. laki-laki tertua dalam kesatuan itu. Bila dalam kesatuan itu terdapat beberapa orang ibu, maka yang menjadi kepala kesatuan ialah laki-laki dari ibu tertua dalam kesatuan itu. Dalam kesatuan serumah, kepalanya disebut *mamak jurai*.

21) Dr. Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 187

Kepala kesatuan paruik adalah *tungganai* atau mamak kepala waris, bila paruik dalam hal ini adalah sebagai pemegang harta pusaka.

3. *Peranan laki-laki dan perempuan dalam kekerabatan matrilineal.*

Sesuai dengan pengertian matrilineal yaitu penerusan keturunan melalui garis perempuan, maka peranan utam bagi seseorang perempuan ialah penyambung garis keturunan dalam kekerabatan. Dalam hal ini kelahiran seorang anak perempuan sangat diharapkan oleh keluarga Minangkabau, karena dengan kelahiran itu garis keturunan belum putus. Kelahiran anak laki-laki tidak berarti apa-apa dalam pelanjutan garis keturunan, karena kalau kemudian ia kawin dan memperoleh anak, maka anak tersebut akan menambah anggota keluarga isterinya.

Oleh karena yang penting itu, maka memberi kepada perempuan hak istimewa sebagai pemegang harta pusaka yang pada waktu dulu merupakan sumber ekonomi. Pepatah adat menyebut perempuan dalam hal ini sebagai *umbo puro*, pemegang kunci. Dua ungkapan tersebut mengandung arti pemegang kekayaan dalam keluarga Puro berarti kas tempat menyimpan uang, sedangkan kunci yang dipegangnya berarti kunci kekayaan dari sistim matrilineal. Karena kekayaan keluarga terdapat pada perempuan, maka ia menduduki kedudukan sentral dalam rumah tangga baik yang menyangkut kedalam maupun keluar. Hal ini tergambar dalam pepatah adat melambangkan perempuan sebagai "*Limpapeh rumah gadang, semarak anjuang nan tinggi*" (Limpapeh rumah gadang, semarak anjung yang tinggi), artinya perempuan memegang kekuasaan atas harta pusaka.

Lain halnya dalam kenyataan sekarang ini, yang mana istri tidak lagi tinggal diam dirumah sebagai limpapeh rumah gadang dan semarak anjung yang tinggi, namun isteri (perempuan) sekarang, telah banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang bekerja untuk membantu suami mencari nafkah, guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang kian hari kian bertambah juga. Hal ini berubah karena bentuk perkawinan sumando bertandang pada waktu dulu, sudah berubah kebentuk perkawinan sumando menetap. Yang mana bentuk perkawinan sumando bertandang tanggung jawab anak-anak dipikul oleh mamaknya. Sedangkan pada waktu sekarang (perkawinan) sumando menetap, tanggung jawab anak-anak dan istri ditanggung oleh ayah (suami).

Laki-laki Minangkabau mempunyai dua peranan dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, sebagai mamak dalam rumah ibunya dan kedua sebagai orang semenda dalam rumah isterinya. Peranan sebagai mamak dirumah ibunya pada hakekatnya bertumpang tindih dengan perempuan yang peranannya sebagai bunda. Bila disebutkan sebelumnya bahwa perempuan sebagai pemegang harta pusaka, maka pemilik kekuasaan secara langsung adalah laki-laki sebagaimana yang dinyatakan dalam pepatah adat *"harta ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan"*. Mamak dan ibu, bersama memikirkan usaha untuk menjaga dan memperkembangkan harta pusaka.

Dalam hubungan keluar, yang mewakili keluarga adalah laki-laki sebagai mamak, baik dalam suku atau nagari dan juga sebagai pimpinan langsung terhadap organisasi kesatuan kerabat dalam setiap lapisan.

Peranan laki-laki sebagai orang semenda di rumah, isterinya adalah lemah sekali. Ia tidak dibebanai tanggung jawab ekonomi terhadap isteri dan anak-anaknya. Kedatangannya pada keluarga itu hanya pada waktu malam, sisa waktu yang dipergunakan dirumah ibunya. Inilah sebabnya tidak intimnya hubungan hubungan ayah dan anak.

Urang *sumando* dirumah isterinya menduduki posisi sampin. Ia bukanlah kepala keluarga dan rumah yang ditempatinya itu bukan rumahnya. Adat seperti ini menempatkan seorang laki-laki di Minangkabau dalam posisi yang serba salah dirumah ibunya ia tidak mempunyai hak atas dirumah itu dan dirumah isterinya ia sebagai tamu yang menumpang.

Bila laki-laki yang tidak mempunyai isteri, keadaannya lebih susah lagi, ia tidak mempunyai tempat bermalam. Dirumah ibunya kamar-kamar yang tersedia telah diisi oleh perempuan dirumah. Ia hanya tinggal disana itupun kalau ia sakit. Dalam keadaan biasa tempatnya adalah surau yang dimiliki oleh setiap kaum. Pada saat sekarang ini dapat kita lihat kenyataannya sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, bahwa peranan urang *sumando* sebagai ayah dirumah isterinya adalah sangat penting sekali, karena ayahlah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya.

Sehingga hubungan antara ayah, isteri dan anak-anaknya menjadi intim. Dan juga kalau diperhatikan bila seorang laki-laki itu tidak mempunyai isteri dia tidak lagi tidur di surau seperti pada zaman dahulu, tetapi ia tetap tinggal di rumah ibunya.

Dalam bidang organisasi kaum, terlihat pada waktu ini telah banyak mengalami perubahan. Kesatuan yang bersifat kekerabatan sudah mulai banyak ditinggalkan dan beralih ke kesatuan yang bersifat lingkungan (teritorial). Laki-laki lebih berperan di bidang politik dan hubungan keluar, sedangkan perempuan berkuasa dalam kehidupan keluarga dalam meneruskan kelangsungan keturunan. Namun bagaimanapun dalam pelaksanaannya, laki-laki dan perempuan itu harus bekerja sama.

4. Perkembangan Sistem Matrilineal

Struktur kekeluargaan matrilineal di Minangkabau telah mengalami perubahan. Faktor yang lebih banyak memberikan pengaruhnya dalam perubahan itu ialah ajaran Islam dan kemudian disusun oleh kehidupan modern sebagai pengaruh dari kebudayaan barat. Tentang sejauh mana sistem matrilineal itu dapat bertahan, dapat dilihat dari segi sejauh mana perubahan berlaku terhadap unsur-unsur yang merupakan pendukung untuk tegaknya sistem tersebut.

Unsur-unsur pendukung yang utama adalah organisasi kesatuan matrilineal yang pada saat sekarang ini dapat kita lihat kenyataannya sehari-hari dalam kehidupan masyarakat dalam peran urang sumando sebagai ayah di rumah istrinya

adalah sangat penting sekali, karena ayahlah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya.

Begitu pula kekuasaan yang terdapat dalam kekerabatan geneologis sudah berubah. Mamak rumah tidak banyak berperan lagi dilingkungan kaumnya. Terutama dalam kehidupan ekonomi serta kehidupan sosial, sudah sedikit pengaruhnya terhadap rumah tangga kemenakannya.

Pengaruh mamak terhadap kemenakannya hanya terlihat dalam moral dan adat. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pengaruh mamak dalam bidang moral dan adat cukup besar, bila dibandingkan dengan kehidupan di kota.

Ada dan ikutnya pengaruh mamak rumah seperti disebutkan diatas, hanya dalam hal tertentu saja, seperti mengawinkan kemenakan, mengganti rumah lama dan membangun rumah baru. Peranan mamak rumah dalam lingkungan kemenakannya yang menyangkut kehidupan keluarga telah diserahkan mamak rumah kepada urang sumando, sehingga peranannya dirumah isterinya sebagai urang sumando lebih besar dari dulu. Jadi dalam hal ini perubahan bukan berarti menghilangkan peranan selama ini, yang terjadi adalah peralihan ke rumah kemenakannya ke rumah isterinya.

Bentuk perkawinan di Minangkabau juga telah mengalami perubahan. Menurut adat Minangkabau, perkawinan berlaku secara eksogami ditinjau dari lingkungan suku dan endogami ditinjau dari lingkungan negeri. Eksogami suku berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sukunya. Alasannya orang yang sesuku adalah bersaudara, sebab masih dapat ditarik garis

keturunan secara matrilineal dan menurut asalnya mereka sama-sama serumah gadang.

Perkawinan endogami berarti bahwa, seorang yang mencari harus diantara sesama negeri dan tidak boleh kawin keluar negerinya. Alasannya adalah karena suami bertempat pada dua rumah. Sebagai urang sumando ia tinggal dan bermalam dirumah isteri. Ia juga mamak rumah ibunya untuk membantu kemenakannya mengolah harta pusaka.

Kedua bentuk larangan perkawinan seperti disebutkan sudah mengalami perubahan. Pertama, ikatan organisasi suku sudah mulai lemah dan rasa persaudaraan diantara sesama suku sudah berkurang. Hal ini disebabkan oleh meluasnya anggota suku dan berkembangnya rumah keluarga. Secara praktis rasa persaudaraan telah terbatas pada lingkungan yang lebih sempit. Hal inilah yang melonggarkan larangan perkawinan sesuku. Pada waktu ini ternyata bahwa perkawinan itu tidak merupakan larangan lagi, asal sudah berbeda penghulunya. Hal ini berarti pengertian eksogami sudah semakin sempit sampai ke batas tertentu, yaitu eksogami dalam pengertian kesatuan paruk.

Kewarisan sebagai unsur pendukung dan sistem kekeluargaan di Minangkabau, juga banyak mengalami perubahan. Kewarisan erat sekali hubungannya dengan organisasi kekerabatan dan tanggung jawab dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Kalau dahulu ahli waris terbatas pada kekeluargaan, matrilineal, yaitu saudara dan kemenakan, pada waktu ini telah menjangkau keluar lingkungan kerabat matrilineal yaitu anak dan isteri. Prinsip kewarisan unilateral telah bergerak kearah warisan bilateral.

E. Harta dan Jenis Harta serta Harta yang diwariskan

Dalam pengertian umum harta pusaka adalah suatu yang bersifat materil yang ada pada seseorang yang telah mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya²⁴⁾.

Dalam pengertian itu dikemukakan kata material untuk memisahkan daripada waris sako, yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang mati kepada yang masih hidup dalam bentuk kebesaran menurut adat., seperti gelar Dt. Rajo Malikan: yang mewarisi secara turun temurun dalam pesukuan Melayu. Perkataan semata akibat kematian dimaksud untuk memisahkannya dari pengertian hibah, yang peralihannya kepada yang masih hidup bukan sebab kematian yang punya harta, tetapi oleh tindakan hukum yang dilakukan pada waktu ia masih hidup.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dibatasi pembahasan yaitu barang-barang apa saja yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Macam-macam harta pusaka :

²⁴⁾ Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 255

1. Dari segi wujud bendanya

Dari segi wujud bendanya, harta pusaka ada dua macam, yaitu tanah dan bukan tanah. Yang dimaksud tanah disini adalah tanah dengan segala yang tumbuh diatasnya, apa yang tersimpan didalamnya dan apa-apa yang berada diatasnya. Yang dimaksud dengan bukan tanah ialah segala sesuatu yang tidak berwujud tanah.

Dari dua bentuk harta tersebut diatas, maka tanah menempati kedudukan utama dalam harta pusaka, karena tanah dalam adat Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal Minangkabau. Disamping itu bagi orang Minangkabau dianggap salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan bernegeri. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam negeri dan dianggap lebih berhak atas kedudukan penting dinegeri itu.

2. Dari segi bentuknya

Dari segi bentuknya, tanah dapat dipisahkan atas dua macam, yaitu hutan tinggi dan hutan rendah. Yang dimaksud dengan hutan tinggi disini ialah segala tanah yang belum diolah yang belum dijadikan tanah pertanian, dengan arti masih tetap tinggal sebagai sebagaimana yang dianugerahkan Allah.

Adapun hutan rendah adalah tanah yang telah digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian ataupun perumahan.

3. *Dari segi asalnya*

Dari segi asalnya bagaimana caranya harta atau tanah itu berada ditangan seseorang yang mati dan yang akan beralih pada ahli warisnya, ada tiga macam:

a. Secara Dipusakai

Pengertian harta yang dipusakai atau pusaka, ialah harta yang didapat seseorang dari generasi sebelumnya sebagai akibat kematian angkatan tersebut. Harta pusaka itu dipisahkan pula dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi, ialah harta yang didapat dengan menaruko atau mencancang oleh nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya kepada kaumnya.

Ciri-ciri harta pusaka tinggi adalah :

- 1) yang memilikinya adalah kaum secara bersama untuk kepentingan bersama.
- 2) Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya, kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula.

Harta pusaka rendah, yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal-usulnya harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan diatasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula

dua tingkatnya yang masih dapat dikenalnya seperti ninik atau mamak, harta itu didapatkan melalui usahanya sendiri.²⁵⁾

Seseorang yang mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Bila sudah mati, maka harta itu diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan dibawahnya (anak dan cucu). Dengan demikian harta itu beralih kepada harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah bila sudah diturunkan kebeberapa generasi, dengan sendirinya akan menjadi harta pusaka tinggi.

b. Secara pencaharian

Harta pencaharian, yaitu harta yang didapat seseorang sebagai hasil usahanya sendiri. Harta usaha sendiri itu dapat dibagidua :

- 1) Tembilang besi, yaitu harta yang didapatnya melalui taruko dari tanah ulayat kaum. Hasil dari perbuatan menaruko itu adalah hak bagi yang menaruko dalam ganggam bauntuak yang dapat dimanfaatkan bersama-sama dalam keluarganya.
- 2) Tembilang emas, yaitu harta atau tanah yang diperoleh dengan cara membeli atau memagang uang untuk maksud itu adalah hasil usaha sendiri. Termasuk dalam kelompok ini harta kaum yang tergadai untuk kepentingan kaum, yang ditebusnya dari usahanya sendiri selama uang belum dikembalikan oleh kaum.

²⁵⁾ Van Dijk, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1960, hal. 45

c. Secara Hibah

Yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebagai hasil dari pemberian orang lain bukan disebabkan dari kematian dari yang punya harta, harta ini menjadi milik yang menerima hibah. Harta hibah ini dapat diwariskan kepada anak cucu.

4. Dari segi penggunaan

Dari segi penggunaannya tanah atau harta dibagi kepada dua bentuk, yaitu hak bersama dan hak bukan hak bersama. Yang dimaksud dengan hak bersama ialah harta yang dimiliki haknya secara genggam beruntuk oleh kaum secara kolektif hingga tidak dapat ditentukan bagian masing-masing anggota kaum dan tidak dapat pula dibagi secara pribadi anggota kaum tersebut.

Yang dimaksud hak bukan hak bersama, adalah harta yang tidak dapat dikelompokkan kepada harta bersama, dengan arti dapat dimiliki oleh pihak lain, seperti pencaharian suami isteri. Dalam kategori ini tidak dipergunakan hak pribadi, walaupun dalam beberapa keadaan pengertian bukan hak bersama dapat identik dengan hak pribadi.

Dalam penentuan hak atas harta di Minangkabau, kata bukan milik bersama tidak sama dengan kata milik pribadi. Karena milik pribadi disini berarti dipunyai oleh seseorang yang tertentu dengan arti individual, sedangkan adat Minangkabau penganut filsafat bersama dalam kemasyarakatan, dasar bersama, tujuan bersama dan cara bersama.

4. *Macam harta yang menyangkut kehidupan suami isteri*

Bila terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dari suatu kaum dengan perempuan dari kaum yang lain dalam perkawinan yang eksogami dan kedua suami isteri diam di rumah pihak isteri, maka dalam kehidupan suami-isteri itu terdapat harta untuk menunjang kehidupan mereka. Harta tersebut dapat terdiri dari bermacam-macam sumbernya. Macam harta itu ditentukan oleh suami atau isteri sebelum berlangsungnya perkawinan, maupun sesudahnya. Macam harta itu ialah :

a. *Harta tepatan*

Yaitu harta yang telah ada di rumah si isteri sebelum berlangsung perkawinan karena dalam adat Minangkabau waktu laki-laki itu datang ke rumah isterinya, sudah didapati harta itu disana.

b. *Harta pusaka,*

Yaitu harta yang oleh istri dimilikinya harta itu bersama-sama secara dipusakai, baik pusaka rendah maupun pusaka tinggi.

c. *Harta pencaharian*

Yaitu harta yang didapat oleh istri sebagai usahanya sendiri dan hibah.

d. *Harta Bawaan*

Yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum perkawinan dan harta tersebut dibawa oleh suami ke rumah istrinya.

Harta bawaan dapat dipisahkan dalam dua macam :

- 1) Harta pusaka yang diterima suami dari mamak atau kaumnya baik dalam bentuk pusaka rendah atau pusaka tinggi. Harta tersebut dapat dibawa suami ke rumah istrinya adalah sebagai hak pakai dari kaumnya.
- 2) Harta pencaharian, baik yang bernana tembilang besi, tembilang emas atau yang diterimanya secara hibah.

e. Harta Perkawinan

Yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik atas usaha suami atau usaha istri atau usaha suami-isteri.

5. Macam harta darisegi tersangkutnya hak orang lain di dalamnya

Dari segi tersangkutnya orang lain di dalamnya harta itu dapat dibagi dua, yaitu *harta suarang* dan *harta sarekat*. Harta suarang atau harta persuarangan, yaitu harta yang dimiliki oleh beberapa orang secara bersama-sama dengan hak yang sama. Harta sarikat yang didapat atas hasil usaha beberapa orang hingga dimiliki oleh orang itu secara bersama pula.

Harta sarikat lebih banyak menampakkan harta yang didapat melalui usaha bersama. Cara berusahanya mungkin berusaha bersama dengan modal atau semata-mata berusaha dengan tenaga bersama secara menjual jasa, atau satu pihak mempunyai modal dilain pihak berusaha dengan modal itu.

Sedangkan harta yang diwariskan dimaksud dalam pembahasan ini adalah semacam harta yang akan dilanjutkan/dialihkan pada generasi selanjutnya.

Harta yang akan diwariskan terbagi beberapa macam, yaitu :

1. Harta Pusaka,

Harta pusaka adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu.

Menurut biasanya sebuah rumah hanya didiami oleh seorang ibu bersama anak-anaknya (mamak tidak menetap dirumah itu dan ayah bukan anggota rumah itu). Dalam bentuk ini harta atau tanah seluruhnya dibawah pengurusan ibu tersebut. Bila si ibu itu mati, maka peranannya dalam penguasaan harta itu diteruskan oleh anak-anak perempuan yang tertua. Dialah yang sekarang menjadi kepala keluarga. Dalam pengolahan harta pusaka itu ia dibantu oleh saudara laki-laki, yang telah mewarisi peranan tersebut dari mamaknya. Bila anak perempuan itu telah mati pula, maka peranannya atas harta itu dilanjutkan oleh saudara yang muda. Demikianlah peranan itu sambung menyambung sampai habis perempuan dalam garis vertikal di rumah itu. Selama itu harta tidak beralih kemana-mana dan tetap dimakan bersama-sama dalam satu dapur.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan ialah yang dibawa oleh seorang suami kerumah isterinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan ini dapat berbentuk hasil pencaharian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan, dan harta kaum dalam bentuk hak pakai ganggam baruntuak yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Bila suami meninggal dunia, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat "*bawaan kembali, tepatan tinggal*",

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali keasalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum, sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali kepada asalnya.

Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencaharian pembujangan sisuami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagai harta sebagaimana harta pencaharian seseorang belum kawin.

3. Harta Tepatan

Yang dimaksud dengan harta tepatan atau harta dapatan adalah harta yang telah ada pada isteri waktu suami kawin dengan isteri itu.

Harta yang didapati oleh suami dirumah isteri itu dari segi asal usulnya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu harta pusaka yang ada dirumah itu dan harta hasil usaha sendiri.

Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya, kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah hasil usahanya hanya untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta pusaka disamping anak-anaknya juga hak bagi saudara-saudaranya.

Bila suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih pula dari rumahnya itu. Kaum sisuami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu.

Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkan bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap yang ada dirumah si isteri waktu ia datang kesana.

Pengertian harta tepatan jelas dalam hal yang meninggal adalah si Isteri. Akan dikemanakan harta peninggalan istri itu. Diantara sekian banyak harta yang ditinggalkannya terhadap harta tepatan. Dalam hal ini berlaku apa yang disebut dalam pepatah adat. Harta tepatan tinggal yang berarti harta tersebut tidak dapat dibawa oleh suami waktu ia meninggalkan rumah itu.

4. *Harta Pencaharian*

Harta pencaharian yang didapat oleh seseorang melalui tembilang besi atau tembilang emas, menurut adat lama dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada.

Dengan demikian harta pencaharian menggabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkannya sudah tiada.

Dengan menggabungkannya harta, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi kemenakan yang pelaksanaannya seperti yang disebut dalam uraian sebelum ini.

Dalam penentuan harta pencaharian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencaharaan itu. Harta pencaharian dalam bentuk tembilang besi dari milik kaum, atau tembilang emas dari hasil usaha yang modalnya berasal dari harta kaum, tidak dapat dikatakan semuanya adalah harta pencaharian secara murni. Dalam keadaan begitu tidak mungkin seluruh harta pencaharian diwarisi oleh anak. Disamping itu kemenakan tidak dapat menuntut secara pasti sebagaimana berlaku terhadap harta pusaka.

Dalam bentuk yang kabur inilah berlaku cara pembagian menurut alur dan patut. Tidak lah adil bila semua harta diambil oleh anak sebagaimana tidak adil bila kemenakan menuntut lebih banyak.²⁶⁾

26) Mr.. M. Nasrun, *Hukum Waris dan Hikum Tanah, Dalam Paper Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968, hal. 25.

Bila harta pencaharian tercampur langsung dengan harta pusaka masalahnya akan menjadi rumit bila dibandingkan dengan harta pencaharian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak kemenakan pasti terdapat didalamnya.

Oleh karena itu tidak hanya kepastian tentang kepemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan kemenakan. Kemenakan menganggap harta itu adalah harta pusaka kaumnya, sedangkan si anak menganggap harta itu dari hasil pencaharian ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

5. *Harta Bersama*

Yang dimaksud harta bersama disini adalah harta yang didapat suami isteri selama ikatan perkawinan. Harta bersama itu disebut juga harta suarang.

Pengertian suarang timbul karena kata tersebut terdapat dalam pepatah "*suarang baragiah, sekutu dibalah*". Atau suarang dibagi, pusaka dibalah, yang artinya harta bersama, yang artinya harta bersama masing-masing mempunyai hak bagiannya, dan sebagai pusaka ia dibelah menurut warisan masing-masing. Apabila terjadi perceraian, harta yang dibawa sebelum bergaul oleh suami, itu dapat dibawa pulang oleh suami, atau oleh kemenakannya kalau ia meninggal. Harta yang didapatinya di rumah isterinya, tetap tinggal di rumah isterinya, tetapi suarang wajib dibagi. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami ke

dalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati suami pada waktu ia kerumah isterinya, walaupun sumber kekayaan itu mungkin pula berasal dari bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila suarang berusaha dilingkungan isterinya, baik mendapatkan bantuan secara langsung dari isterinya/tidak. Dengan demikian hasil usaha diluar lingkungan siisteri dalam keluarga yang tidak kompak, tidak dapat disebut harta bersama.

Harta bersama dapat dipisahkan sebagai berikut.²⁷⁾

. Yang meninggal adalah suami, dalam hal ini ada beberapa kemungkinan :

- a. Sisuami tidak beranak dirumah tempat ia berusaha dan juga tidak mempunyai anak dan isteri ditempat lain.
- b. Sisuami tidak beranak ditempat ia berusaha, tetapi mempunyai anak atau isteri ditempat lain.
- c. Sisuami mempunyai anak ditempat ia berusaha dan tidak mempunyai anak dan isteri ditempat lain.
- d. Sisuami mempunyai anak ditempat ia berusaha dan juga mempunyai anak ditempat lain.

Yang meninggal adalah isteri. Dalam hal ini ada dua kemungkinan :

²⁷⁾ Amir Syafrifuddin. *op. cit.* Hal. 284.

- a. Si Isterinya mempunyai anak.
- b. Si Isterinya tidak mempunyai anak.

Dalam hal yang kedua ini (bila isteri meninggal), sejauh yang menyangkut harta peninggalan si isteri tidaklah menjadi perhitungan apakah suami mempunyai anak atau isteri ditempat lain atau tidak.

Bila suami yang meninggal :

- a. Ahli waris adalah isterinya, karena harta yang diwariskan bukan harta yang berasal dari kaum, maka secara mutlak kaum tidak dapat menuntutnya. Adanya tuntutan dari kaum hanya didasarkan kepada putusanya hubungan kekeluargaan karena tidak adanya anak pisang ditempat itu. Dan alasan kedua beranggapan bahwa usaha yang dihasilkan harta bersama itu banyak sedikitnya berasal dari harta kaum yang diusahakan si suami.
- b. Terjadi bila seseorang laki-laki mempunyai beberapa orang isteri yang tinggal dirumah masing-masing. Disalah satu rumah ia berusaha dengan isterinya sedangkan dirumah lainnya tidak berusaha, dirumah tempat ia berusaha ia tidak mempunyai anak dan dirumah lain itu ada anaknya. Bila suami meninggal, maka harta bersama dibagi dua. Yang separoh adalah hak penuh bagi isterinya yang ikut berusaha dan separoh lagi untuk ahli warisnya, yang dengan sendirinya didapat oleh anak-anak di luar lingkungan tempat berusaha itu.

- c. Terjadi bila suami mempunyai seorang isteri. Ditempat itulah ia berusaha bersama dan mereka mempunyai anak. Kalau ditarik garis seperti disebut di atas bahwa janda berhak atas separoh harta bersama, maka yang separoh lagi adalah warisan. Dalam hal ini tidak ada ahli waris lain diluar rumah tempat ia berusaha itu. Oleh karena itu seluruh harta tinggal dirumah itu. Pihak suami tidak berhak atas harta tersebut karena didalamnya tidak tersangkut harta bersama dari kaum.
- d. Terjadi bila suami mempunyai beberapa orang isteri dan mempunyai anak disetiap rumah isterinya itu, sedangkan si suami hanya berusaha disalah satu rumah isterinya. Dalam hal ini terdapat dua perbedaan kemungkinan tersebut diatas, yaitu harta tetap tinggal dirumah tempat ia berusaha dan harta dibagi dua diantara suami dan isteri. Dalam bentuk pertama anak tidak mendapat hasil harta bersama kecuali anak dirumah tempat berusaha, sedangkan dalam bentuk kemungkinan yang kedua anak-anak ditempat lain juga ikut menikmati sebagian dari hasil usaha ayahnya itu.

F. SISTEM WARIS YANG BERLAKU

Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu baik berujud atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.

Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang cara-cara perkawinan. Dari kedua hal ini muncul ciri khas struktur kemasyarakatan Minangkabau, yang menimbulkan bentuk atau sistem tersendiri pula dalam hukum kewarisan. Beberapa pokok dari sistem hukum Minangkabau akan diuraikan dibawah ini.

1. Sistem Unilateral

Yang dimaksud dengan sistem kewarisan unilateral adalah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekeluargaan, dan satu garis kekeluargaan disini adalah garis kekeluargaan melalui ibu.

Harta pusaka biasanya diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.

Sistem kekeluargaan matrilineal memelihara kelangsungan hak dan kewajiban ke dalam batas-batas kelompok kekeluargaan yang membatasi keanggotaan berdasarkan garis keturunan perempuan. Berdasarkan sistem itu maka yang dianggap keluarga dalam hubungan dengan hak dan kewajiban ialah kelompok tertentu yang disebabkan oleh kelahiran seorang perempuan.

Susunan keluarga menurut paham ini ialah keatas ibu, nenek, keatasnya lagi yaitu ibunya nenek. Kesamping ialah laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh ibunya ibu. Kebawah adalah anaknya baik laki-laki/saudara perempuan. Anak dari anak perempuannya, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya anak-anak dari

cucunya yang perempuan. Keseluruhan kelompok yang bertalian melalui jalur perempuan inilah yang bernama keluarga menurut pengertian adat Minangkabau.

Selanjutnya pembatasan ini ditentukan oleh bentuk perkawinan eksogami yang mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan kaum yang disebut sumando. Sumando itu berbeda sukunya dari isteri dan anaknya. Bentuk perkawinan ini membatasi lingkungan keluarga kedalam batas yang sempit. Ayah bukan keluarga dalam pengertian ini, karena ia datang dan ia tetap mengikuti kaum ibu yang melahirkannya. Begitu pula ayah dari ibu ayah dari nenek.

Semua adalah pendatang dari luar lingkungan keluarga, selanjutnya ibu dari ayah, ibu dari kakek berada diluar lingkungan keluarga. Anak dari anak laki-laki bukan kerabat dalam pengertian diatas, karena perkawinannya keluar hanya untuk menambah jumlah anggota keluarga dari isterinya yang dengan sendirinya bukanlah kaumnya.

Pengertian kaum adalah pengertian yang terbatas ini dihubungkan pula pada prinsip adat Minangkabau harta pusaka adalah milik kaum dan dipergunakan hanya untuk kepentingan kaum secara kolektif. Hal ini menolak kemungkinan peralihan harta pusaka keluar dari lingkungan kaum.

Perkawinan melalui garis laki-laki berarti mengalihkan harta keluar kaum. Tidak dapat mewarisi dari ayah karena hal tersebut berarti membawa harta kaum ayah keluar dari lingkungannya, begitu pula dari ayahnya itu.

Tidak dapat mewariskan kepada anak dari anak laki-laki, karena yang demikian berarti beralihnya harta pusaka kepada kaum dari cucu tersebut.

Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan menurut adat Minangkabau hanya berlaku dalam satu garis kekeluargaan dan satu ini adalah melalui garis perempuan. Inilah yang disebut sistem kewarisan unilateral Minangkabau.

2. Sistem Kolektif

Sistem ini berarti bahwa yang berhak atas pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama sistem ini maka harta tidak dibagi-bagi tapi disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

Dalam pembahasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa, harta pada umumnya berbentuk tanah yang didapat melalui pewarisan, baik harta pusaka rendah atau pusaka tinggi, adalah hak bersama oleh penerimanya.

Dalam harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu menerimanya juga secara kolektif. Hak kolektif ini didasarkan kepada kenyataan bahwa harta itu tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Disamping itu harta yang diterima dari nenek moyang itu diperuntukkan bagi kepentingan keluarga secara bersama-sama.

Harta pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya, yang oleh sipemilik itu harta tersebut diperolehnya melalui hasil pencariannya. Dan harta ini tidak diterimanya secara kolektif. Penerusan harta secara kolektif didasarkan pada pokok pikiran sebagai berikut ²⁸⁾

- a. Untuk menjaga kekompakkan didalam keluarga,
- b. Untuk menjaga keutuhan harta.

Adanya sifat kolektif mempersulit pengalihan harta keluar kaum, karena selama menjadi milik bersama, semua pihak dapat mengontrolnya.

Pemilikan harta secara kolektif menyebabkan kematian seseorang anggota dalam rumah tidak berpengaruh terhadap harta dan pemilikan bersama terhadap harta itu. Begitu pula terjadinya kelahiran dirumah itu tidak berpengaruh terhadap hak bersama atas harta itu, artinya pribadi dalam rumah tidak menjadi pertimbangan, seperti kata pepatah *"masuk tidak menggenap, keluar tidak mengganjil"* ²⁹⁾. Maksudnya walaupun dari anggota kaum lahir atau meninggal atau keluar dari kaum maka tidak akan berubah hak bersama terhadap harta itu.

Pada waktu sekarang ini harta bersama semakin sedikit dan harta pribadi semakin memainkan peranan, walaupun lapangannya sudah semakin menyempit. Seorang ayah memperlakukan secara sama dan tidak terpisah-pisah. Hal

²⁸⁾ Amir Syarifuddin, *op. cit.* Hal. 234.

²⁹⁾ Wiryono Projodikuro, SH. *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, hal. 4

ini dapat dilihat dari bangunan rumah yang mempunyai kamar yang banyak, dan inilah yang mendorong si ayah bila memberikan hartanya pada seluruh anaknya secara kolektif.

G. Fungsi Harta terhadap Pembinaan Kaum

Yang dimaksud disini adalah harta pusaka, yaitu harta pusaka dalam pengertian khusus yaitu harta yang berada ditangan seseorang atau kaum sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya.

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan terdahulu, harta pusaka ditinggalkan oleh nenek moyang penemu harta itu untuk kepentingan bersama anak cucunya dikemudian hari. Kepentingan bersama anak cucunya ada dua tingkat, yaitu kepentingan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka.

Kedua kepentingan yang mendesak, yang seandainya tidak dapat ditutupi dengan hasil harta pusaka itu sendiri.

Penggunaan harta pusaka dalam kaum yang berhubungan dengan kepentingan yang mendesak ada 4 perkara³⁰⁾

1. Rumah gadang katirisan,
2. Gadis besar belum bersuami,

30) Amir Syarifuddin, *op. Cit.* Hal. 223

3. Mayat terbujur ditengah rumah,
4. Pembangkit batang terendam.

Ad. 1. Rumah Gadang Katirisan

Rumah gadang adalah pusat administrasi kekeluargaan matrilineal. Secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberikan perlindungan seluruh lingkungan kesatuan parauik. Bila rumah gadang tersebut mengalami kerusakan akan dapat membawa kerusakan kepada rumah itu dan dapat pula mengganggu ketenangan dan kesehatan penghuninya. Untuk keperluan memperbaiki disediakan dana dari harta pusaka.

Ad. 2. Gadis Besar belum bersuami

Menurut kebiasaan yang berlaku di Minangkabau, gadis yang sudah menginjak dewasa harus dikawinkan. Bila gadis sudah melewati umur dewasa belum juga kawin adalah suatu yang kurang baik dan memalukan keluarga. Untuk menutup malu dan kekurangan itu segala daya dan dana disediakan dari harta pusaka.

Ad. 3. Mayat terbujur ditengah rumah

Mayat terbujur ditengah rumah berarti biaya pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut peristiwa kematian. Dan hal ini dibiayai oleh harta pusaka.

Ad. 4. Pembangkit Batang Terendam

Dalam pengertian adat Minangkabau membangkit batang terendam berarti bertegak penghulu yang jabatan itu sudah lama ditangguhkan. Dan untuk itu maka harus diadakan pengangkatan penghulu yang baru supaya adat terisi. Dan biayanya itu diambil dari harta pusaka.

Keseluruhan penggunaan harta pusaka yang disebutkan diatas menyangkut fungsinya didalam kaum. Adapun fungsinya keluar digambarkan dalam pepatah adat yang berhubungan dengan fungsi lumbung yaitu "*penagak korong kampung, penjamu dagang lalu*" (Untuk menolong orang kampung). Dari dua buah ungkapan kata adat tersebut, terlihat fungsi sosial dari harta pusaka. Penagak korong kampung dapat berarti untuk membantu, karib kerabat dan orang sekampung yang membutuhkan pertolongan. Pengertian ini juga berlaku untuk membantu keperluan bagi orang kampung seperti pembangunan masjid, irigasi, jalan dan lainnya.

Penjamu dagang lalu berarti memberikan pertolongan kepada orang yang terlantar dalam perjalanan, melayani tamu-tamu yang berkunjung dan keperluan lain yang berbentuk amal sosial.

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi harta pusaka , adalah :

1. Untuk menjaga keselamatan hidup orang berkaum yang terkandung dalam perserikatan sekaum itu, supaya jangan terlantar hidupnya apabila diantara mereka tidak dapat berusaha kian kemari mencari kehidupan.

2. Untuk menjaga keselamatan hidup kaum dan anak-anaknya yang masih kecil, yang belum pandai mencari penghidupan sendiri ³¹⁾

Karena adanya harta pusaka itulah menjadi kuat dan kokoh pertalian orang berkaum itu selama-lamanya, turun temurun, tidak dapat hidup bercerai atau bernafsi-nafsi, malah sebaliknya tetap hidup berkaum, karena terkungkung oleh harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi itu.

³¹⁾ Ms. Rasyid Manggis Dt. Rajo Panghoeloe, *op.cit*, hal. 114.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya mendasarkan kepada data sekunder saja tetapi juga didasarkan pada data primer (penelitian lapangan).

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. dimana erat kaitannya dengan masalah yang diteliti berdasarkan kenyataan – kenyataan yang ada dalam masyarakat yang bersumber pada data primer.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota solok, dimana kota solok terdiri dari dua kecamatan yaitu:

Kecamatan Tanjung Harapan, dan kecamatan Lubuk sikarah. Lokasi penelitian diambil di Kecamatan Lubuk sikarah tepatnya di Kelurahan simpang rumbio,

hususnya pada kaum Caniago Supanjang Aro, karena secara Purposive (karena tujuan tertentu), dimana pada kaum Caniago Supanjang Aro terdapat kasus yang sesuai dengan penelitian tesis ini

C. Sumber Data

Data akan dikumpulkan dari buku – buku literature dan dari penelitian lapangan yang dilakukan penulis :

- a. Data Primer adalah data pokok yang diperoleh dari lapangan (bersifat empiris). Jenis data ini diperoleh dari sumber data yang berasal dari responden yang ditetapkan berdasarkan teknik sampling.

Untuk melengkapi data maka diambil nara sumber dari :

- Mamak Kepala Waris Kaum Caniago Supanjang Aro.
 - Pemuka – pemuka kaum Caniago Supanjang Aro.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui hasil yang diperoleh dari penelusuran serta penelaahan studi kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Merupakan penelitian terhadap data sekunder untuk mencari konsepsi – konsepsi teori – teori, pendapat – pendapat ataupun penemuan – penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan kepustakaan berupa :

- Peraturan perundang – undangan (UU Pokok Kehutanan No. 5/1967 LN 1967 – 8).
- Karya ilmiah para sarjana yaitu buku – buku referensi tentang Hukum Adat.
- Perda No. 9 tahun 2000, Peraturan Daerah Sumatera Barat, struktur organisasi Kabupaten kembali ke Nagari.
- Hasil karya ilmiah para sarjana
- Hasil – hasil penelitian.

b. Observasi, adalah suatu teknik pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi obyektif yang ada pada lingkungan obyek penelitian.

- c. Kuesioner, adalah suatu teknik pengumpulan data berisi daftar pertanyaan secara tertulis yang ditunjukkan kepada responden, dengan kata lain adalah suatu daftar yang memuat sejumlah pertanyaan dengan atau tanpa jawaban. Kuesioner yang berbentuk tertutup dalam arti telah disiapkan jawaban yang ada, dan tinggal responden memilihnya. Sedangkan yang berbentuk terbuka, maka diberi kesempatan kepada responden mengemukakan pendapatnya sendiri.
- d. Wawancara, sebagai teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan nara sumber yang dilakukan secara berstruktur sesuai pedoman yang telah disiapkan secara tertulis. Baik sebagai pelengkap kuesioner pada responden, maupun sebagai pedoman wawancara.

E. Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dan disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Pengolahan

terhadap data tersebut diatas melalui editing dan menyusun data tersebut berdasarkan penelitian.¹⁾, dan diambil kesimpulannya

¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal. 35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Mamak Kepala Waris

Masyarakat hukum adat minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keibuan) yaitu suatu sistem dimana keturunan itu menurut garis ibu seperti yang diketahui bahwa dalam suatu negeri di Minangkabau itu terdiri dari atau didiami oleh beberapa suku dan suku terdiri oleh beberapa kaum, seterusnya kaum terdiri pula dari beberapa paruik, tiap-tiap kelompok itu mempunyai pemuka atau pemimpin yang mendukung persekutuan itu serta mempunyai harta pusaka.

Begitu juga kaum yang merupakan bagian dari suatu suku disamping mempunyai pemimpin dan anggota juga mempunyai harta pusaka, baik yang diwarisi maupun yang didapati oleh kaum itu.

Pada masa dahulu kaum itu pada mulanya terdiri dari keturunan seibu yang mendiami rumah asal yang disebut rumah gadang, bila anak perempuan dari keturunan itu telah dewasa kemudian dikawinkan maka untuk itu diberikan satu kamar dari rumah gadang itu begitulah seterusnya jika ibu mempunyai beberapa anak perempuan, seandainya rumah itu mengizinkan. Bagaimana dengan yang laki-laki ? yang laki-laki itu tidur disurau yang dimiliki oleh kaum itu.

Saudara laki-laki tertua dari ibu disebut mamak atau tungganai, mamak atau tungganai inilah yang bertanggungjawab atas perbaikan pemeliharaan dan

keamanan rumah gadang serta laki-laki keturunan berikutnya. Karena perkembangan selanjutnya kaum laki-laki semakin lama semakin besar karena telah begitu besarnya bagi suatu kaum maka kaum tadi dipecah dan terjadilah kaum yang baru, tiap-tiap kaum itu dikepalai oleh mamak kepala waris.

Secara singkat dapat dikatakan mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam satu kaum, dia bertanggung jawab mempertahankan keutuhan kaumnya keluar dan kedalam dan juga bertanggung jawab dalam mengawasi menjaga harta pusaka kaumnya baik keluar atau kedalam kaumnya. Namun dalam berbuat dan beritikad terutama menyangkut harta kaum mamak kepala waris harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari seluruh anggota kaum, harus bermufakat lebih dahulu dengan anggota kaum baik yang laki-laki atau yang perempuan, sekalipun dalam kehidupan berkaum itu kekuasaan mamak kepala waris lebih tinggi dari anggota kaum namun kekuasaan itu berasal dan datang dari anggota kaum tadi.

B. Syarat pengangkatan kepala waris

Mamak kepala waris adalah merupakan suatu jabatan dalam suatu kaum oleh karena itu orang yang menduduki jabatan ini dituakan selangkah dan ditinggikan seranting dari pada anggota lain didalam kaum, dia dijadikan pemimpin didalam kaum dan mempunyai wewenang bertindak kedalam dan keluar kaum.

Menurut ketentuan adat mamak kepala waris adalah saudara laki-laki tertua dari ibu kalau tidak ada yang tertua maka yang dibawahnya dan begitulah seterusnya sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

1. tidak terlalu tua
2. tidak sakit ingatan (harus waras)
3. tidak merantau, karena kalau merantau tentu tidak bisa mengikuti perkembangan kaum dan harta pusaka kaum
4. cerdas dan bertanggung jawab
5. adil terhadap semua anggota kaum

bila seseorang yang menurut ketentuan adat berhak menjadi mamak kepala waris tetapi dia tidak melengkapi syarat-syarat di atas maka rapat anggota kaum menentukan atau memilih anggota kaum yang lain yang akan menjadi mamak kepala waris didalam kaum tadi, dalam lingkungan waris bertali darah.

Biasanya yang menjadi mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum, tetapi di negari Solok ketentuan ini bukanlah menjadi ukuran atau kriteria didalam memangku jabatan karena pengangkatan mamak kepala waris berdasarkan pemilihan dan mufakat kaum.

Didalam melaksanakan tugasnya mamak kepala waris harus bijaksana sesuai dengan alur dan patut. Seandainya mamak kepala waris telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka rapat anggota kaum dapat diberhentikanannya dan kemudian memilih mamak kepala waris yang baru.

C. Fungsi dan Peranan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi

Seorang mamak kepala waris dapat mewakili kaum untuk urusan keluar dan bertindak kedalam untuk dan atas nama kaum, demikian juga pengertian segala sesuatu adalah ditangan mamak kepala waris ¹⁾.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang fungsi dan peranan mamak kepala waris itu secara umum, baik fungsi kedalam maupun peranan mamak kepala waris keluar kaum.

1. Fungsi mamak kepala waris kedalam kaum

- a. Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum.
- b. Sebagai hakim dalam penyelesaian pertikaian yang terjadi diantara anggota baik masalah pribadi dalam pergaulan sehari-hari maupun masalah harta pusaka.
- c. Mengelola harta pusaka kaumnya ²⁾.

Jika ada tanah pusaka yang tidak terpelihara, maka mamak kepala waris menganjurkan supaya tanah-tanah itu dapat di manfaatkan, begitu juga

¹⁾ Syamsunir. AM, **Musyawarah dan Mufakat serta Pelaksanaannya dalam Adat Minangkabau** (dalam *Dinamika Masyarakat dan Adat di Minangkabau*, Pusat penelitian Universitas Andalas, 1987/1988, hal 120.

²⁾ Syamsunir. AM, **Pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris** (dalam *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1987/1988, hal. 28

jika keadaan masih memungkinkan mamak kepala waris mengajak anak kemenakannya untuk menaruko guna mendapatkan tanah baru sebagai penambah tanah-tanah yang telah ada.

d. Mengatur perindustrian hasil harta pusaka dan menjaga kelestarian ³⁾.

Pelaksanaan pengaturan ini dilakukan dengan cara setiap anggota kaum dalam hal ini adalah kemenakan perempuan yang telah bersuami di beri hak untuk menggarap sawah pusaka atau tanah perladangan secara bergiliran. Hal ini tergantung kepada keadaan, begitu juga kalau ada kemenakan yang telah bersuami tadi akan mendirikan rumah di atas tanah pusaka, maka mamak kepala waris langsung menentukan lokasi dimana rumah itu akan didirikan.

Setiap panen mamak kepala waris mengumpulkan sepertiga hasil dari sawah atau tanah pusaka yang di garap kemenakan tadi untuk keperluan kaum dan disimpan dalam rumah gadang.

Penggunaan sepertiga dari hasil sawah pusaka tadi oleh mamak kepala waris di Nagari Solok adalah untuk :

- Biaya keperluan seperti, perhelatan perkawinan kemenakan, biaya untuk kematian dan lain-lain.
- Biaya perbaikan rumah pusaka, menjemput sawah-sawah yang tergadai atau untuk penambah harta pusaka.

³⁾ Syamsunir. AM *op.cit*, hal 28

- Membantu anggota kaum yang memerlukan bantuan misalnya orang-orang tua, janda atau membantu sekolah kemenakan.

2. Peranan mamak kepala waris keluar kaum

Dinagari Solok pada umumnya peranan mamak kepala waris keluar kaum adalah:

- Wakil kaum dalam peradilan, umpama sebagai tergugat atau sebagai penggugat.
- Wakil kaum dalam melakukan transaksi atas tanah pusaka kaum setelah dapat persetujuan dari semua anggota kaum umpama menjual dan menggadai tanah pusaka.
- Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka, karena tanah pusaka itu harus didaftarkan atas nama mamak kepala waris ⁴⁾.
- Wakil kaum dalam kerapatan suku
- Penanggung jawab keluar dalam upacara adat dalam kaum seperti helat perkawinan.
- Penanggung jawab atas pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah pusaka kaum.

⁴⁾ Syamsir Dt. Perpatih, *Status Tanah Pusaka di Minangkabau setelah disertifikatkan*, laporan penelitian UNAND, 1985, hal.35

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi mamak kepala waris kedalam dan keluar kaum terhadap harta pusaka tinggi kaum adalah sebagai berikut :

1. Mengelola harta pusaka kaumnya.
2. Mengatur pendistribusian hasil harta pusaka dan menjaga kelestariannya harta pusaka kaumnya.
3. Wakil kaum dalam peradilan, umpama sebagai tergugat atau penggugat dalam hal perkara tanah pusaka.
4. Wakil kaum dalam hal transaksi atas tanah pusaka.
5. Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka

Fungsi dan peranan mamak kepala waris yang telah diuraikan di atas tadi adalah hasil penelitian penulis di samping literatur yang ada dan merasakan langsung sebagai warga masyarakat Nagari Solok.

Pada saat sekarang ini fungsi mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaum di Nagari Solok sudah dirasakan berkurang dalam pelaksanaannya. Berkurangnya fungsi mamak kepala waris ini di sebabkan oleh semakin intimnya antara ayah dan anak-anaknya yang menyisihkan keakraban antara mamak dengan kemenakan⁵⁾.

⁵⁾ Syamsunir AM, *op.cit*, hal 30

D. Sebab-sebab Terjadinya Pergeseran Fungsi dan Peranan Mamak Kepala Waris dalam Mengawasi Pusaka Tinggi Kaum

Pergeseran fungsi dan peranan mamak kepada waris dalam mengawasi harta pusaka tinggi pada Kaum Caniago Supanjang Aro merupakan perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh pergeseran tanggung jawab seorang laki-laki (mamak) ke rumah anak dan istrinya. Hal ini bertitik tolak dari sistem perkawinan yang dilaksanakan masyarakat dewasa ini sudah menjurus kepada bentuk perkawinan sumando menetap yang sebelumnya dikenal dengan bentuk perkawinan sumando bertandang.

Suami atau semenda lambat laun semakin bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Ayah dan suami lebih mencurahkan perhatian terhadap keluarganya. Selanjutnya keakrabannya dengan anak dan istrinya menyisihkan pengaruh dan kekuasaan mamak yang secara doktrin dulu dianggap dominan dan menentukan dalam kehidupan anak kemenakannya yang biasa disebut kaumnya⁷⁾

Menurut Syofyan Thalib, SH perubahan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini menyangkut dengan ciri masyarakat Minangkabau itu sendiri⁸⁾

Perubahan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori.

7) Firman Hasan, SH. Suatu Pengantar Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, Pusat Penelitian Unand Padang, 1987/1988, hal.9

8) Syofyan Tahlib, SH. Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat dan Adat Minangkabau, Pusat Penelitian Unand Padang, 1987/1998, hal. 17

1. Sistem Keakraban

Hamka mengemukakan bahwa salah satu ciri masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan menurut garis ibu ⁹⁾ Konsekuensi lanjut dari pendapat ini adalah perihal suku seorang adalah menurut suku ibunya bukan suku dari pihak ayah. Namun demikian bagi sebagian kecil masyarakat peran suku tidak kuat lagi dipegang, sebagai telah terjadi perkawinan antara Minangkabau dengan suku bangsa lain atau bahkan dengan bangsa asing sehingga unsur kesukuan tidak menjadi suatu yang teramat penting.

Matrilocal marriage kata De Jong juga merupakan salah satu ciri masyarakat Minangkabau yang matrilineal, dimana suami pindah ke rumah isteri. ¹⁰⁾ Namun pada perkembangan dewasa ini sudah terjadi pergeseran yang cukup berarti. Dimana timbul kecenderungan baru bahwa sekitar 52% laki-laki Minangkabau yang ditanyai menolak anggapan yang diutarakan De Jong diatas. yang ternyata tidak lagi menjadi ciri orang Minangkabau. ¹¹⁾ Bergeserlah domisili keluarga dari rumah isteri ke tempat lain berakibat lanjut pada kekuasaan pada keluarga. Pada mulanya peranan mamak demikian dominan dan meninggalkan sedikit hak bagi si ayah, nampaknya mulai ditinggalkan. Hal ini dapat kita lihat

⁹⁾ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963, hal,34.

¹⁰⁾ Syofyan Thalib, SH, *op.cit*, hal.18

¹¹⁾ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963, hal,34.

pada kenyataan sekarang ini yang mana peranan ayah dalam keluarga sudah dominan.

Dengan demikian peranan ayah sebagai kepala keluarga semakin besar bahkan kelak bisa diramalkan bahwa ayah yang akan berkuasa dan menentukan dalam urusan rumah tangga dan simamak akan berperan sebagai pihak yang tinggal hanya memberikan restu persetujuan saja atas suatu kebijaksanaan yang telah diambil oleh ayah ibu.

Juga telah ditemukan kenyataan sekarang ini bahwa isteri sudah mulai mengambil peranan penting dalam kekuasaan-kekuasaan yang tadi dimiliki mamak, sudah mulai beralih pada keluarga itu sendiri, isteri dengan suami.

2. Pusaka

Pusaka dalam Minangkabau dikategorikan kedalam dua kelompok yakni pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi, adalah semua harta yang diwarikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum yang penguasaannya ada ditangan mamak. Harta pusaka itu tidaklah boleh digadaikan apalagi dijual, kecuali ada 4 (empat) hal, yaitu :

- Rumah gadang ketirisan,
- Mayat terbujur ditengah rumah,
- Gadis besar belum bersuami,
- Pembangkit batang terandam.

Dalam mewujudkan kepastian hukum hak milik atas tanah pemerintah melalui PP No. 10, tahun 1961, mewajibkan semua tanah supaya disertifikatkan, begitu juga terhadap tanah ulayat (harta pusaka tinggi kaum). Dimana dalam mensertifikatkan tanah pusaka tinggi kaum itu harus atas nama mamak kepala waris. Namu demikian pasda saat ini pensertifikatkan tanah bisa dilakukan atas nama pribadi (anak keponakan) setelah tanah yang merupakan harta pusaka tinggi telah diperuntukkan (diganggam bauntuak, hiduik bapangadok). Sehingga anak kemenakan dapat menjual tanah tanpa sepengetahuan mamak kepala waris.

Dengan adanya hal tersebut diatas maka telah terjadi perubahan sosial dalam bentuk renggangnya hubungan sosial baik dalam kaum yang terlihat dengan timbulnya pertentangan antara anggota kaum, terutama antara mamak dengan kemenakan

3. Kekuasaan dirumah tangga

Ayah sebagai sumando dirumah isterinya, kini semakin memainkan peranan yang lebih penting bahkan menjadi dominan atau paling tidak semakin menentukan. Hal ini disebabkan oleh masalah residensi keluarga yang mulai berangsur dari teritorial kaum isteri kelokasi lain bahkan ada yang tinggal di teritorial suami,¹²⁾

¹²⁾ Syofyan Thalib, **Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat dan Adat Minangkabau**, Pusat Penelitian UNAND Padang, 1987/1988, hal.17

Dengan tempat tinggal keluarga yang telah bergeser sedemikian rupa, tanggung jawab akan semakin terasa dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya keakraban dengan keluarga lain tidak seakrab dengan ayah, ibu atau saudara yang tinggal di rumah. Akibatnya hubungan dengan mamak dengan kemenakan perempuan agaknya sudah jadi yang kedua mungkin juga yang ketiga. Jadi tidak sesuai lagi dengan pendapat Hamka yang menyatakan bahwa yang menjadi puncak dalam rumah tangga adalah nenek perempuan.¹³⁾

Melemahnya wibawa mamak dan juga nenek antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan antara mamak disatu pihak, dengan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Minangkabau yang dididik orang tua mereka sendiri.

Melihat perubahan-perubahan yang terjadi ditengah masyarakat dewasa ini mengakibatkan pergeseran fungsi dan peranan mamak kepala waris kaum dalam mengawasi kelangsungan harta pusaka tinggi kaumnya. Disamping hal tersebut diatas juga ada beberapa faktor perubahan di dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi dan peranan mamak kepala waris dalam mengawasi kelangsungan harta pusaka tinggi kaumnya faktor-faktor tersebut ialah :

¹³⁾ Hamka. Op. cit. Hal.33.

1. *Penguasaan Tanah*

Tanah sebagai pengikat bagi hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan dan sebagai sarana dalam merealisasi tanggung jawab "Mamak" dalam keluarga menurut sistem kekerabatan matrilineal, karena mamaklah yang bertugas memelihara tanah kaum dan bertanggung jawab terhadap kemenakan dan keberadaan serta keutuhan kaumnya. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa ketentuan adat yang demikian tak langsung sepenuhnya diakui oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari 69% dari responden menyatakan bahwa yang menetapkan pengolah tanah adalah mamak (mamak kepala waris) 16%, menyatakan bahwa peraturan mengenai pengolah tanah dalam kaum telah semenjak dahulu dan anggota kaum tinggal mengikuti saja, dan telah ditemui adanya kecenderungan bahwa yang menentukan siapa yang akan mengolah tanah adalah pemilik tanah sendiri (dalam hal ini bagi tanah yang telah bersertifikat). Kenyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Solok telah mulai merasa dan mengakui kepemilikan pribadi atas tanah.

2. *Menentukan Masa Depan Kemenakan*

Ketentuan adat yang selama ini menunjukkan bahwa "Mamak" adalah orang yang "Mangatuah Mangabaruhkan" (mengurus dan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan) kemenakan, termasuk dalam hal menentukan pendidikan dan persiapan masa depan kemenakanya. Dan hasil penelitian ini dapat

diketahui bahwa adanya mentaati pranata adat demikian. Didalam kenyataan hidup sehari-haripun hal ini juga dapat ditemui bahwa "Mamak" dalam hal menentukan masa depan kemenakan hanya sebagai pelengkap dan bukan lagi memegang peran yang menentukan.

3. *Sistim pewarisan harta pencaharian*

Perubahan sistim pewarisan harta pencaharian, dari yang semula dan mamak diwariskan kepada kemenakan sebagai tambahan bagi harta pusaka yang telah ada didalam keluarga matrilinealnya, tetapi dengan adanya kenyataan bahwa seorang laki-laki yang telah berkeluarga lebih cenderung mewariskan harta pencahariannya kepada anak dari pada kemenakan.

Dengan adanya perubahan pelaksanaan pewarisan harta pencaharian tersebut, maka tidak akan ditemui lagi adanya penambahan harta pusaka yang berasal dari harta pencaharian "Mamak" walaupun harta pusaka dapat bertambah, maka itu telah merupakan "ganggam Bauntuak" (sudah ada bagian masing-masing).

4. *Bukti tertulis hak atas tanah*

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tidak mengenal adanya bukti tertulis hak atas tanah, pemeliharaan dan yang melindungi tanah dari pihak luar adalah mamak

kepala waris walaupun yang merupakan pemiliknya adalah wanita, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak berlakunya UUPA, dimana kepada masyarakat diperkenalkan pemilikan pribadi atas tanah, maka pemilik yang namanya tercantum didalam sertifikat, yang harus mengawasi dan mempertahankan haknya dari gangguan pihak lain.

Berkurangnya peranan dan fungsi "mamak" dalam kaitannya dengan berkurangnya tanah milik bersama, yang selama ini berada dibawah perlindungannya (mamak kepala waris), semakin nyata terlihat jika tanah tersebut telah disertifikatkan, dan pensertifikat tidak mencantumkan nama "Mamak" (mamak kepala waris) sebagai pemilik untuk dan atas nama kaumnya.

Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya "Media" pengikat hubungan kekerabatan antara Mamak dan kemenakan, pranata yang berkembang sehubungan dengan penguasaan tanah ini, akan memperlihatkan adanya rasa saling terbebas dari suatu ikatan, disatu pihak, "Mamak" merasa bebannya berkurang dalam hal menjaga dan melindungi tanah kaumnya, dipihak lain kemenakan merasa terbebas dari pengawasan "mamak" (mamak kepala waris) dalam mendayagunakan tanah yang dikuasainya.

Akibat lebih lanjut dari adanya pengawasan pribadi atas tanah, oleh nama yang tercantum didalam sertifikat, dan adanya rasa saling terbebas dari suatu ikatan yang selama ini harus dipatuhi, masyarakat di daerah penelitian merasakan

bahwa setelah tanah di sertifikatkan terlihat adanya kecendrungan semakin lemahnya hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan

5. *Pengaruh budaya rantau*

Dalam penelitian ini diperlihatkan bahwa pergeseran peranan dan kedudukan "Mamak" dalam keluarga matrilinealnya disebabkan oleh adanya jarak yang berjauhan antara mamak dengan kemenakan, karena salah satu pihak pergi merantau. Pengaruh rantau terhadap hubungan kekerabatan.

6. *Pengaruh Rumah Inti*

Pesatnya kegiatan pembangunan, dan semakin banyaknya penghuni "Rumah Gadang", menyebabkan anggota "Rumah Gadang" yang merasa mampu keluar dari "Rumah Gadang" dan mendirikan rumah inti yang hanya dihuni oleh ayah, ibu dan anak.

Timbulnya "rumah inti" yang hanya dihuni oleh keluarga kecil, menyebabkan hubungan yang semakin dekat antara anak dengan bapak, dari pada dengan "mamak". Disamping itu, kalau semula "rumah inti" dibangun oleh "mamak" untuk kemenakannya dari hasil mendayagunakan harta pusaka, atau dari hasil rantau, tetapi harta pusaka sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan utama anggota kaumnya, sementara hasil, "rantau" bagi "mamak" telah digunakan untuk membiayai kehidupan anak dan isterinya.

Keadaanya yang demikian, baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan peranan dan kedudukan "mamak" dalam keluarga matrilinealnya.

E. Kendala yang dihadapi mamak kepala waris dalam mengawasi harta pusaka tinggi kaum.

Mamak kepala waris pada kaum caniago supanjang aro seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting didalam mengawasi kelangsungan harta pusaka tinggi kaum (tanah) agar dapat dipelihara dan dinikmati oleh anak kemenakannya secara turun temurun. Dalam penguasaan tanah dan pengelolaan tanah tersebut diatur sedemikian dibawah pimpinan mamak kepala waris dalam kaum, seperti siapa yang akan mengolah tanah atau bagaimana cara pembagian hasil panen untuk kebutuhan keluarga.

Tetapi dengan dirasakan bahwa tanah yang dikuasai dan diolah ini semakin hari tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup untuk semua anggota kaum dikarenakan jumlah anggota kaum semakin berkembang sedangkan tanah atau harta pusaka tinggi yang ada tetap dan tidak berubah maka mamak kepala waris memulai pengelolaan tanah tersebut dengan memperuntukkan pada keluarga dengan garis keturunan matrilineal (ibu).

Pengolahan tanah oleh keluarga ini mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ini mengakibatkan aturan-aturan dulunya tentang penguasaan dari pengolahan tanah secara bersama-sama dan diawasi oleh mamak kepala waris kaum sudah mulai dirasakan berkurang. Sehingga akhirnya terlihat pengolahan tanah harta pusaka tinggi dilakukan secara perorangan semakin nyata, ditambah seiring dengan mulai keluarnya anggota kaum dari tempat tinggal bersama (rumah gadang) ke rumah yang baru (rumah inti).

Perpindahan keluarganya dengan membangun kediaman baru menyebabkan semakin kuatnya penguasaan tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum secara pribadi. Disini terlihat kekuasaan mamak kepala waris dalam kaum semakin berkurang.

Pada sebuah keluarga yang menguasai tanah atau harta pusaka tinggi boleh dimiliki karena tanah tersebut didalam adat telah dinyatakan "*ganggam bauntuak-hiduik ba pan gadok*" (Gennggam beruntuk, hidup bepekerjaan) oleh mamak kepala waris didalam kaumnya, artinya tanah tersebut boleh dimiliki setelah syahkan atau disetujui oleh kaum, sebagai miliknya dan pengurusan serta pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.

Dulunya *ganggam bauntuak-hiduik bapangadok*, atas tanah dapat diperoleh oleh seorang anggota kaum berdasarkan keputusan rapat kaum yang memberikan

hak kepadanya, tetapi tidak bisa diperjualbelikan. Kecuali untuk kepentingan yang mendesak, seperti :

- Rumah gadang ketirisan,
- Mayat terbujur ditengah rumah,
- Gadis besar belum bersuami,
- Pembangkit batang terandang.

Harta pusaka tinggi (tanah) yang telah diperuntukkan tersebut terus adalah secara turun temurun dan berlanjut melalui garis keturunan ibu. (matrilinial), sehingga pengolahan tanah selama bertahun-tahun mengakibatkan rasa kepemilikan secara pribadi semakin kuat. Ditambah lagi dengan diberlakukannya UU No. 5 tahun 1990 sebagai Peraturan Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikat di daerah Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. DA.6980/III-27/1983, tanah pusaka tinggi yang telah diperuntukkan dapat disertifikat atas nama pribadi atau perorangan karena telah disahkan oleh mamak kepala waris, penghulu suku dan diketahui oleh KAN.¹⁴⁾

Hal ini yang menyebabkan pada saat sekarang ini merupakan suatu kendala bagi mamak kepala waris kaum untuk mengawasi kelangsungan harta

¹⁴⁾ Wawancara dengan Mamak Kepala Waris Kaum Caniago Supanjang Aro, Amrinov Dias SH Dt. Ula Gadang, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2002.

pusaka tinggi kaumnya. Karena harta pusaka tinggi yang telah disertifikatkan tersebut dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan Mamak Kepala Waris karena mempunyai bukti yang kuat dan syah menurut hukum yang mengakibatkan kelangsungan harta pusaka tinggi tersebut lama kelamaan semakin punah atau menjadi sedikit.

F. Pendapat-pendapat Tokoh Adat, Para Sarjana tentang Fungsi dan Peranan Mamak Kepala Waris Dewasa ini

Dalam hal pendapat-pendapat tokoh adat dan para sarjana tentang fungsi dan peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaum di Minangkabau pada umumnya dan di Nagari Solok pada khususnya, penulis berhasil mewawancarai beberapa orang tokoh adat di Nagari Solok dan memperoleh data dari literatur yang penulis punyai, adalah sebagai berikut :

1. Amrinof Dias, SH Dt. Ula Gadang, Mamak Kepala Waris Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok yang menurutnya :
Proses dan perubahan zaman menyebabkan timbulnya nilai-nilai baru dan tenggelam nilai-nilai kemasyarakatan lama yang dianggap tidak cocok dengan tuntutan zaman. Mamak Kepala Waris sebagai lelaki tertua atau pihak yang dianggap mempunyai wawasan dalam suatu kaum, menurut adat Minangkabau masih mempunyai peran yang cukup penting dalam membina kelangsungan hidup kaum. Bahkan terlihat, bahwa peran mamak kepala waris terhadap pembinaan harta pusaka tetap tidak digantikan oleh unsur lain dalam masyarakat. Disisi lain peranan sumando menjadi lebih dominan akibat semakin besarnya tanggung jawab materiil terhadap anak isterinya, sehingga kewibawaan mamak kepala waris terdesak, kecuali untuk yang bersifat waris.

2. Abdi Mutaqin Dt. Majo Urang, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, yang menurutnya :
Bahwa pada saat sekarang ini mengenai fungsi dan peranannya mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaum ini telah terjadi pergeseran sedemikian rupa, sehingga fungsinya tidak seperti dulu lagi, bahwa mamak kepala waris mempunyai fungsi mengawasi harta pusaka tinggi. Sekarang kenyataannya sudah berubah karena mamak sekarang sudah berpola pikir individu, sehingga tanggung jawab terhadap anak diutamakan daripada kemenakan dan harta pusaka tinggi. Tetapi peranannya masih ada seperti dalam hal perkawinan, di Nagari Solok ini mamak harus ikut menyetujui perkawinan itu.
3. Chatib Dt. Dubalang Basa, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok, yang menurutnya :
Didalam fungsi dan peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaum dewasa ini, dimana adanya harta pusaka tinggi yang disertifikatkan, baginya untuk dijual mungkin sekali, yang mana ini akan menimbulkan masalah dalam Kerapatan Adat Nagari.
4. Zulfahmi Dt. Rajo Diaro, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok yang menurutnya :
Pada masa sekarang ini fungsi dan peranan mamak kepala waris terhadap pusaka tinggi kaum sering tidak dimengerti oleh seorang penghulu, dimana adanya mamak yang tidak mau tahu dengan kehidupan kaum serta kemenakannya.
5. Tulus Dt. Manti Batuah, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok yang menurutnya :
Perubahan terhadap fungsi dan peranan mamak kepala waris pada saat sekarang ini disebabkan pergeseran-pergeseran yang terjadi terhadap pola pikir yang sudah berubah. Mamak Kepala Waris yang dulunya memikirkan kelangsungan hidup kemenakan muali berangsur memikirkan diri sendiri dan keluarga dikarenakan kesibukan pekerjaan dan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya.
6. Anasrul Dt. Majo Basa, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok yang menurutnya :
Budaya rantau yang melekat pada orang Minang menyebabkan perubahan-perubahan terhadap fungsi dan peranan mamak kepala waris. Dimana mamak kepala waris hidup di daerah perantauannya, sehingga tidak dapat mengetahui secara langsung perkembangan anak kemenakannya dan harta

pusaka tinggi kaumnya yang menjadi tanggung jawab seorang mamak kepala waris, hal ini juga mengakibatkan seorang mamak kepala waris kurang mengetahui keadaan kampungnya dan melalaikan pengawasan terhadap harta pusaka tinggi kaum.

7. Deswandi Dias, SH Dt, Bandaro Kuniang, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok yang menurutnya :
Fungsi dan peranan seorang mamak kepala waris dewasa ini telah mulai berkurang terhadap pengawasan harta pusaka tinggi kaum dikarenakan telah banyaknya harta pusaka tinggi kaum yang telah disertifikatkan, sehingga pengawasan harta pusaka telah beralih menjadi tanggung jawab pribadi.
8. Masril Dt. Malin Mansoho, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok yang menurutnya :
Nilai-nilai adat yang dulunya dipegang teguh sudah mulai berkurang. Ini terjadi dikarenakan kemajuan pendidikan anak kemenakan. Dengan banyaknya yang berpendidikan tinggi fungsi mamak kepala yang dulunya sangat berpengaruh terhadap anak kemenakan menjadi berkurang.
9. Yasril Dt. Rangkayo Barani, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok yang menurutnya :
Peralihan tanggung jawab mamak kepala dari rumah anak kemenakan ke anak dan istrinya menyebabkan seorang mamak kurang mengawasi perkembangan harta pusaka kaumnya. Hal ini menyebabkan fungsi mamak yang dulu sangat berperan terhadap anak kemenakan sudah tidak dirasakan lagi.
10. Jaban Dt. Samprono Kayo, anggota Kaum Caniago Supanjang Aro, Nagari Solok yang menurutnya :
Pensertifikatan harta pusaka tinggi kaum yang diperuntukkan untuk diolah dan dinikmati secara perorangan menyebabkan peranan dan fungsi mamak kepala waris menjadi berkurang dan hal ini juga menyebabkan kendala bagi mamak kepala waris dalam mengawasi harta pusaka tinggi kaumnya karena dapat dijual.¹⁵⁾

Dari kesepuluh pendapat tadi yang penulis himpun tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan serta fungsi dari mamak kepala waris

¹⁵⁾ Wawancara Penulis dengan Toko-tokoh Adat pad Kaum Caniago Supanjang Aro Nagari Solok pada tanggal 5 – 10 Juli 2002.

terhadap harta pusaka tinggi telah bergeser sedemikian rupa, sehingga hubungan mamak dengan kemenakan menjadi renggang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1.a Fungsi mamak kepala waris pada saat sekarang telah mengalami fungsi pergeseran dikarenakan oleh semakin akrabnya suami istri dan anak mengakibatkan mamak itu sendiri lebih cenderung mendidik anak-anaknya dari pada kemenakan. Dimana saat sekarang tidak terlihat lagi seorang mamak kerumah orang tuannya (rumah gadang) tetapi sudah menetap dirumah istri dan anak-anaknya.
 - b. dalam hal harta pusaka tinggi kaum di saat sekarang ini fungsi mamak sudah tidak dominan lagi dalam mengawasi harta pusaka kaum karena saat sekarang ini tanah pusaka tidak lagi menjadi patokan utama untuk mencari nafkah tetapi sudah beralih pada harta pencarian tembilang emas, karena harta pencaharian itu dapat diwariskan pada anak dan cucu, sedangkan harta pusaka sebagai simbol kekayaan suatu kaum. Sehingga fungsi mamak pada saat ini tidak seperti pada jaman dahulu.
-
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran fungsi dan peranan mamak kepala waris dikarenakan :
 - a. dalam penentuan masa depan kemenakan
 - b. sistem pewarisan harta pencaharian
 - c. bukti tertulis hak atas tanah

- d. pengaruh budaya rantau
- e. pengaruh timbulnya rumah inti

B. SARAN

Mengingat tanah milik bersama merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberadaan keluarga matrilineal Minangkabau dan sekaligus merupakan "Media" pengikat bagi hubungan kekerabatannya, maka dalam hal memasyarakat " bukti tertulis hak atas tanah" khususnya dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, hendaknya ada peran aktif dari instansi yang mengeluarkan sertifikat untuk mengarahkan masyarakat yang akan mensertifikatkan tanahnya, agar sertifikat yang di mintakan itu adalah untuk dan atas nama kaum. Sehingga keberadaan ciri khas sistim kekerabatan matrilineal masih tetap di pertahankan yang dapat memperlihatkan kebhinekaan budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

RINGKASAN TERHADAP HASIL PENELITIAN

Pergeseran Fungsi Mamak Kepala Waris Harta Tinggi Kaum

Dari uraian diatas dapat ditarik analisa bahwa penyebab terjadinya pergeseran fungsi dan peranan Mamak Kepala Waris tersebut adalah :

Pergeseran fungsi itu disebabkan oleh bergesernya tanggung seorang laki-laki atau Mamak kerumah anak dan istrinya hal ini disebabkan terjadinya perubahan sistim perkawinan dalam masyarakat dewasa ini dari bentuk perkawinan sumando bertandang ke bentuk perkawinan sumando menetap yang mana mulanya seorang suami hanya dianggap pemberi bibit dan tidak bertanggung jawab penuh terhadap anak dan istrinya menjadi suami yang betul-betul bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Dengan besarnya peranan ayah sebagai kepala keluarga menyisihkan peranan seorang Mamak untuk menentukan masa depan seorang kemenakan. Dengan perubahan itu maka sistim pewarisan terhadap harta mata pencaharian dari yang semula diwariskan dari Mamak ke kemenakan sebagai tambahan harta pusaka yang telah ada dalam keluarga matrilinealnya dengan adanya kenyataan bahwa seorang laki-laki lebih cenderung mewariskan harta pencaharian kepada anak dari pada kemenakan sehingga tidak akan ditemui lagi adanya penambahan harta pusaka yang berasal dari harta pencaharian mamak.

Dengan berlakunya UUPA dimana masyarakat diperkenalkan pemilikan pribadi atas tanah, dengan Program Nasional (Prona) diperkenalkannya kepemilikan

dengan sertifikat, mengakibatkan banyaknya tanah-tanah yang semula dikuasai secara ganggam bauntuak (diperuntukkan) dijadikan kepemilikan secara pribadi (dengan mensertifikatkan). Dengan adanya kepemilikan tanah secara perorangan mengakibatkan aturan-aturan dulunya tentang penguasaan pengolahan tanah secara bersama-sama dan diawasi oleh mamak kepala waris kaum sudah dirasakan berkurang sehingga akhirnya terlihat pengolahan tanah harta pusaka tinggi dilakukan secara perorangan semakin nyata ditambah seiring dengan keluarnya anggota kaum dari tempat tinggal bersama (rumah gadang) ke rumah yang baru (rumah inti) dengan adanya kekuasaan terhadap kepemilikan tanah secara perorangan tidak dapat dipastikan yang pada mulanya tanah harta pusaka tinggi itu tidak dapat diperjual belikan kecuali untuk kepentingan yang mendesak seperti :

- Rumah gadang katirisan
- Mayat terbujur ditengah rumah
- Gadis besar belum bersuami
- Pembangkit batang terendam

Karena tergantung kepada pribadi dari anggota kaum yang mendapat persetujuan dari mamak kepala waris dan anggota kaum untuk membuat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut.

Berarti disini peranan mamak untuk mengawasi harta pusaka tinggi telah mengalami pergeseran dikarenakan oleh hal tersebut diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Akademika Prescindo, Jakarta, 1994.**
- Ali Syahbana ST, Sistem Monarki Minangkabau dan Kedudukan Perempuan, International Seminar On Minangkabau, Bukit Tinggi, 1980.**
- Azheri, Busyra, Eksistensi Tanah Adat (Ulayat) dalam UUPA dan Permasalahannya di Sumatera Barat, Laporan Penelitian Unand Padang, 1995**
- .Azheri, Busyra, Hak Menguasai Negara dalam Bidang Pertambangan dan Implikasinya bagi Masyarakat Adat, dalam Prospektif Sosial Yuridis Kebijakan Hukum Pertambangan di Sumatera Barat 2001**
- Batuah, Maruhum, Dt., Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Pustaka Asli Jakarta, 1950.**
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1997.**
- Bulkaini, Pensertifikatan tanah adat menurut Hukum Agraria Nasional, Laporan Penelitian Unand Padang, 1988**
- Bushar, Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradinya Paramita, Jakarta, 1984.**
- Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.**
- Damas Reni Prihartini, Laporan Penelitian Unand Padang 1996**
- Dirajo, Sangguno. Dt., Ceraian Paparan Adat Alam Minangkabau, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1987.**
- Djarwanto, Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Liberti, Yogyakarta, 1984.**
- Efektifitas Pelaksanaan Tugas KAN dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pusaka Menurut PERDA No. 13 Tahun 1983**
- Elmis, Linda, Hak Ulayat Sepanjang Adat Kini dan Masa Depan, Laporan Penelitian Unand Padang 1991**

- Firmansyah, Macam-macam Hak atas Tanah dan Tata Cara Mensertifikatkan Tanah**, Laporan Penelitian Unand Padang, 1990
- Firmansyah, Hak Atas Tanah Gadai setelah Berlakunya UU No. 5 Th 1960**, Karya Ilmiah, Unand Padang 1993
- Gazalba, Sidi, Drs., Konflik antara Adat, Agama dan Pengaruh Barat**, Seminar Islam di Minangkabau, Padang, 1069.
- Hamka, H., Islam dan Adat Minangkabau**, PT. Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1984.
- .Hamka,H, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi**, Firma Tekad, Jakarta, 1963.
- Hakimy, Idrus, H., Dt., Rajo Penghoeloe, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau**, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- .Hakimy,Idrus,H,Dt,Rajopengholoe, Pegangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau**, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Hasan, Firman, Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau Suatu Pengantar (dalam) Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau**, Pusat Penelitian Unand Padang, 1987/1988.
- Hermayulis, Penguasaan tanah oleh masyarakat Hukum Adat Minangkabau dan pengaruhnya terhadap meluasnya lahan kritis di Sumatera Barat**, Laporan Penelitian Unand 1994
- Hermayulis, Pengaruh Perubahan Penguasaan Tanah dan Susunan Pemerintahan di Daerah terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau**, Laporan Penelitian Unand Padang, 1999
- .Hermayulis.Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Thread Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat**, Disertasi, UI, Jakarta, 1999.
- Kemal, Iskandar, Dr., Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau (dalam) Mukhtar Naim (ed) Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Manggis, Rasyid, M., Dt., Rajo Panghoeloe. Sejarah Minangkabau dan Adatnya**, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.

- Nasrun, M, **Hukum Waris dan Hukum Tanah dalam Paper Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau**, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Projodikuro, Wiryono, Dr., SH., **Hukum Waris di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1968.
- Rajo Penghoeloe, Manggis Rasyid M, Dt. **Sejarah Minangkabau dan Adatnya**, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987
- Soekanto Soejono, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta., 1986.
- Soemitro Ronny Hanitijo, **Metedologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soerojo Wignyodipoero, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Syahmunir, AM, **Persegeran Peranan Mamak Kepala Waris dalam Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau**, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1987/1988.
- Syahmunir, AM, **Musyawarah dan Mufakat serta Pelaksanaannya dalam Adat Minangkabau (dalam) Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau**, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1987/1988.
- Syarifuddin, Amir, Dr., **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau**, Laporan Penelitian Unand, Padang, 1985.
- Syamsir, Dt. Parpatih, SH., **Status Tanah Pusaka di Minangkabau setelah disertfikan**, Laporan Penelitian Unand Padang 1985.
- Syamsir, Dt. Parpatih, SH., **Pola Kekerabatan Menurut Hukum Adat Minangkabau**, Laporan Penelitian Unand Padang 1997
- Syawir, M. **Hukum Adat waris sebagai Pengantar**, Diklat Fakultas Hukum Padang, 1995
- Thalib, Syofyan, SH., **Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan, Sebuah Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang**, 1978.
- Yahya Samin, dkk, **Peranan Mamak terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini**, *Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya*, Sumatera Barat, 1996

Yaswirman, Sistem Kesukuan dan Kekerabatan Minangkabau, Makalah Diskusi disampaikan pada Diskusi Serial : Alam dan Adat Minangkabau Keluarga Mahasiswa Minangkabau, Jakarta Raya, 1996

Yaswirman, Politik Hukum pada masa penjajahan sekitar Hukum Adat dan Hukum Islam, Laporan Karya Tulis, Unand Padang, 1998

Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1960.

Westenenk. LC, De Minangkabausche Nagari II, terjemahan oleh Mahyudin Saleh, SH., FHUK Unand, Padang, 1960.

Zahara, Hukum Adat Waris, Diktat fakultas Hukum Unand Padang 1992